

# PERAN KELOMPOK WANITA DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN PERDESAAN



Oleh :

**Dr. Wasman, M.Ag**  
**Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si**  
**Wartoyo, M.S.I**

**PERAN KELOMPOK WANITA DAN LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN  
KAUM PEREMPUAN PERDESAAN**

**Oleh :**

**Dr. Wasman, M.Ag**

**Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE.M.Si**

**Wartoyo, M.S.I**

**Penerbit**

**CV. ELSI PRO**

---



**PERAN KELOMPOK WANITA DAN LEMBAGA  
KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN  
KAUM PEREMPUAN PERDESAAN**

**Dr. Wasman, M.Ag**

**Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE.M.Si**

**Wartoyo, M.S.I**

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO  
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713  
Email : [chiplukan@yahoo.com](mailto:chiplukan@yahoo.com)

Editor : Layaman, SE.M.Si

Desain cover & layout : Ciptadhi

Percetakan : CV. Elsi Pro

Cetakan Pertama : Januari 2016

100 Halaman

ISBN 978-602-1091-31-9

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan pengabdian dengan judul Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini, khususnya kepada pihak Ditjen DIKTIS Kementerian Agama RI sebagai donatur yang telah memberikan support kami baik secara moril maupun materil.

Pengabdian yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian berfokus pada upaya pemberdayaan dan penguatan kaum perempuan di perdesaan yang selama ini identik dengan perempuan tertinggal dapat mengeluarkan potensi dan kreativitasnya melalui penguatan peran lembaga keuangan mikro dalam hal ini koperasi dan juga kelompok-kelompok wanita yang ada di desa Ragawacana. Oleh sebab itu dilaksanakanlah kegiatan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas SDM kaum perempuan yang diharapkan dapat berdampak pada kemajuan koperasi dan kelompok wanita sehingga dapat menghasilkan outcome berupa kesejahteraan keluarganya masing-masing.

Akhirnya tiada gading yang tak retak begitu pula pengabdian ini tidak lepas dari kelemahan, oleh karena itu kritik serta saran sangat diharapkan dan penulis pun berharap semoga pengabdian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca semua dan masyarakat pada umumnya.

Cirebon, Januari 2016

Tim Pengabdian

- Dr. Wasman
- Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE.M.Si
- Wartoyo, M.S.I



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A    Latar Belakang.....	1
B    Definisi.....	2
C    Ruang Lingkup.....	2
D    Masyarakat Sasaran.....	3
E    Logical Framework.....	5
<b>BAB II    PRINSIP DAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARKAT</b>	
A    Sejarah Pemberdayaan.....	7
B    Prinsip Pemberdayaan.....	9
C    Pendekatan Pemberdayaan.....	10
D    Model Pemberdayaan.....	13
E    Partisipasi Masyarakat.....	15
F    Prinsip Dasar Pemberdayaan.....	17
G    Bentuk Pemberdayaan.....	21
H    Penguatan Kapasitas.....	22
I    Tujuan Pemberdayaan.....	23
J    Tanggungjawab Stakeholders.....	23
<b>BAB III    KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
A    Pemberdayaan Perempuan.....	25
B    Strategi Pemberdayaan Perempuan.....	28
C    Pendekatan Efisiensi terhadap <i>Women in Development</i> (WID).....	30
D    Pendekatan Pemberdayaan atau <i>Gender and Development</i> (GAD) .....	31
E    Implementasi Pemberdayaan Perempuan.....	32
F    Peran Lembaga Keuangan Mikro.....	34
G    Tanggungjawab                      Stakeholders                      dalam	11

	Pemberdayaan.....	
<b>BAB IV</b>	<b>METODE PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT</b>	
A	Pengertian <i>Participation Action Research</i> .....	45
B	Tipe tipe <i>Participation Action Research</i> .....	49
C	Prinsip-prinsip <i>Participation Action Research</i> ....	52
D	Instrumen Kerja <i>Participation Action Research</i> ...	53
E	Rancangan Penelitian PAR.....	54
F	Menyusun Proses Penelitian.....	55
G	Langkah-langkah Riset Aksi.....	57
H	Prinsip-prinsip PAR.....	59
I	Tehnik Pendampingan.....	63
<b>BAB V</b>	<b>IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN</b>	
A	Kondisi Objektif Lokasi Pengabdian.....	71
B	Profil Desa Ragawacana.....	72
C	Sejarah Desa Ragawacana.....	73
D	Keadaan Sosial.....	76
E	Keadaan Ekonomi.....	77
F	Kondisi Pemerintahan Desa.....	77
G	Pembagian Wilayah Desa.....	78
H	Struktur Organisasi.....	79
I	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.....	80
	1. Pelatihan Koperasi.....	80
	2. Seminar Motivasi Kewirausahaan.....	82
	3. Pelatihan Akuntansi Koperasi.....	84
	4. Pelatihan Marketing.....	86
	5. Pelatihan Manajemen dan Keuangan Desa....	88
	6. Pelatihan Teknologi Tepat Guna.....	90
J	Pendampingan.....	92
K	Hambatan Pendampingan.....	94



L	Permasalahan Pendampingan.....	95
M	Hasil Pendampingan.....	98
<b>BAB VI PENUTUP</b>		
A	Kesimpulan.....	105
B	Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		106
<b>DAFTAR TABEL</b>		109
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		110
<b>LAMPIRAN</b>		111

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat berfungsi untuk menyelaraskan daya dan



kemampuan di atas, yang harus dimiliki oleh masyarakat demi terbentuknya masyarakat yang berdaya, maju dan sejahtera sesuai dengan tuntutan pembangunan.

### **B. Definisi**

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "Empowerment", yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Lebih lanjut Payne (1997 : 266), mengatakan bahwa: *Empowerment seeks to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients*".

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.

### **C. Ruang Lingkup**

Pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.



Keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*).

#### **D. Masyarakat Sasaran**

Ragawacana merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Karamatmulya Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat tepatnya sebelah timur Gunung Ciremai. Sebagaimana umumnya kawasan yang berada di kaki gunung Desa Ragawacana termasuk kawasan yang memiliki potensi yang tinggi pada sektor pertanian dan sub sektor lainnya sejenis perikanan dan perkebunan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang, petani dan buruh tani.

Besarnya potensi pada sektor pertanian belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat karena masyarakat terutama kaum laki-laki berkecenderungan lebih menyukai bekerja pada sektor lain misal jadi PNS, pegawai swasta, perdagangan dan merantau. Di sisi lain peran kaum perempuan dalam mengoptimalkan potensi yang ada terasa minim dan belum diberdayakan. Bahkan kaum perempuan lebih dominan hanya pada peran domestiknya yaitu mengurus rumah tangga sehari-hari. Sehingga banyak kaum perempuan yang terjebak pada rutinitas harian yang tidak memiliki sumber pendapatan sendiri yang memiliki daya beli rendah sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan mereka semisal dengan melakukan penguatan kelompok wanita dan lembaga keuangan mikro.

Usulan program pemberdayaan perempuan ini merupakan buah ketertarikan penulis terhadap aktifitas kelompok-kelompok perempuan yang berada di Desa Ragawacana Kabupaten Kuningan. Didasari oleh keberadaan perempuan yang berada pada posisi marginal di dalam masyarakat, terutama masyarakat perdesaan



yang kuat dipengaruhi budaya patriarkhi, maka pemberdayaan kaum perempuan dengan penguatan kelompok-kelompok wanita di desa menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, dikaji dan dikembangkan serta didampingi.

Aktivitas kelompok yang berkuat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan kehidupan sehari-hari sampai persoalan ekonomi yang membelit rumah tangga merupakan kajian menarik yang membutuhkan bantuan penyelesaian. Kelompok-kelompok wanita tersebut telah ada di masyarakat cukup lama, hal ini mengindikasikan bahwa kelompok tersebut cukup eksis di masyarakat.

Di sisi lain problem pemberdayaan kaum perempuan adalah lemahnya akses permodalan di lembaga-lembaga keuangan semisal bank. Aktivitas mereka cukup terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan mikro sejenis koperasi atau LKM pengelola dana-dana bantuan pemerintah seperti PNPM, kompensasi BBM dan sejenisnya. Namun keberadaan LKM di perdesaan pun terasa belum maksimal dan optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal ini disebabkan oleh karena lemahnya kesadaran dalam pemanfaatan LKM, kesadaran masyarakat, dan manajemen yang lemah karena kompetensi pengelola yang tidak relevan. Berdasarkan pengamatan ternyata mayoritas pengelola LKM dan atau koperasi adalah kaum perempuan begitu pula mayoritas anggota dan penggunanya adalah kaum perempuan.

Berdasarkan analisis masalah di atas penulis berkesimpulan bahwa salah satu bentuk upaya untuk melakukan pemberdayaan kaum perempuan di perdesaan adalah dengan cara melakukan penguatan dan optimalisasi terhadap peran kelompok wanita dan lembaga keuangan mikro yang ada di perdesaan. Atas dasar pertimbangan inilah penyusun berketetapan hati untuk mengajukan usulan program pengabdian masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan Melalui Penguatan Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro di Desa Barat".



### E. Logical Framework

Todaro (1983) mengatakan pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional. Pada pelaksanaannya konsep pembangunan tersebut masih jauh dari kenyataan. Berbagai temuan empiric menunjukkan masih terjadi marginalisasi kehidupan masyarakat terutama kaum miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Dengan demikian, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).

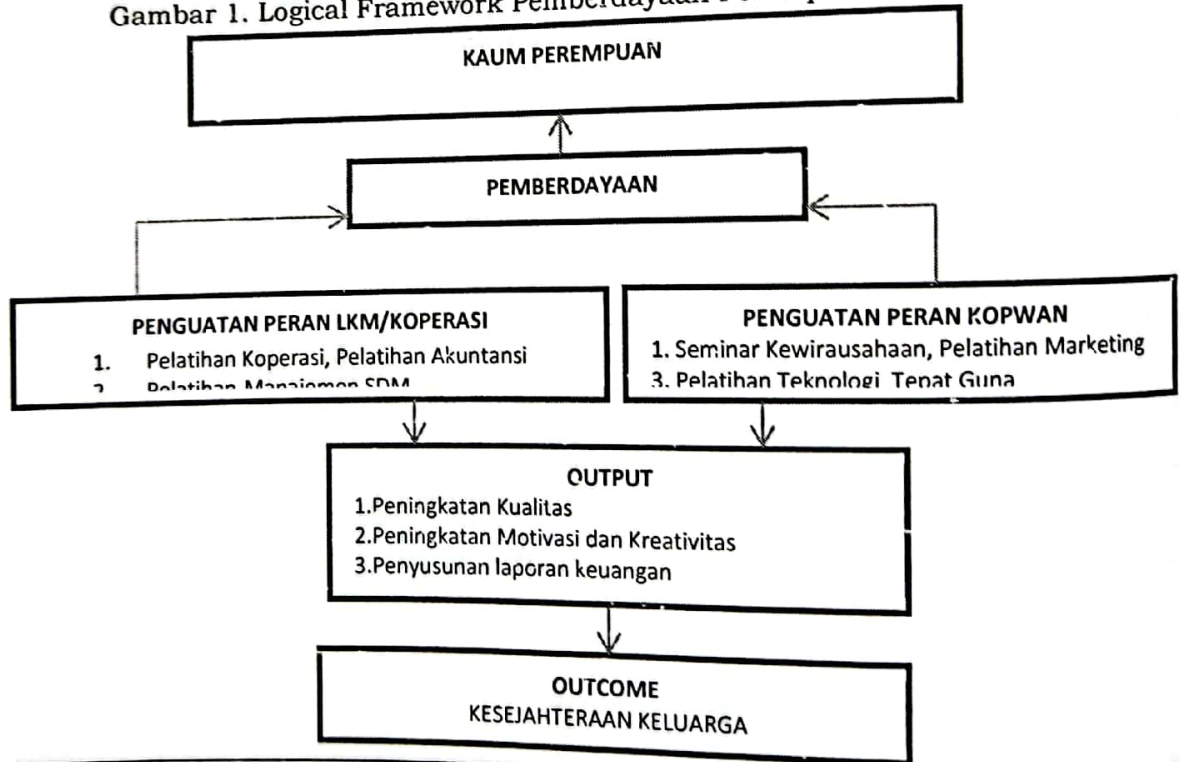
Menurut Marguiret Robinson (2000) dalam Wiloejo (2005), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut



didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extree poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar. Dengan demikian, maka bila digambarkan, logical framework akan tampak seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1. Logical Framework Pemberdayaan Perempuan



Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan

## BAB II

### PRINSIP DAN MODEL

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### A. Sejarah Pemberdayaan

Secara paradigmatik munculnya konsep pemberdayaan bisa dilacak dari perlawanan ilmu-ilmu sosial humanistik terhadap positivisme yang sudah lama menjadi ideologi hegemonik dalam tradisi ilmu-ilmu sosial. Positivisme adalah sebuah aliran dalam tradisi keilmuan yang hendak membersihkan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praksis kehidupan manusia. Ia menganggap pengetahuan mengenai fakta obyektif sebagai pengetahuan yang sah. Ilmu, menurut positivisme, harus netral, bebas dari nilai, bebas dari kepentingan dan lain-lain (A. Giddens, 1975; V. Kraft, 1979).

Positivisme menjadi racun mujarab bagi ilmu-ilmu sosial dan para ilmuwan sosial. Mereka selalu mengganggu cara berpikir positivistik, dengan mengutamakan obyektivitas dalam berbagai kegiatan keilmuan. Dalam kegiatan penelitian misalnya, pengikut positivisme selalu menggunakan metode survei dan kuantitatif yang selalu menghasilkan kebenaran ilmiah yang obyektif. Subyektivitas sama sekali tidak dikenal dalam benak mereka, karena subyektivitas dianggap tidak ilmiah dan menyesatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep berpihak dan pemberdayaan maupun metode action research tidak dikenal dalam tradisi positivisme. Tetapi banyak penelitian survei yang lengkap dengan banyak rekomendasi ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Sikap obyektif ilmuwan sosial yang berhaluan positivisme menjadikan mereka tidak "kritis" terhadap relasi-relasi sosial dalam masyarakat, sehingga mereka secara sistemik justru



terlibat dalam proses penindasan atau ikut melanggengkan *status quo* yang represif.

Positivisme yang menghegemoni ilmu-ilmu sosial dan perguruan tinggi memang tidak luput dari kritik. Perspektif berhaluan kiri (Marxis), teori kritis Mazhab Frankfurt sampai postmodernisme telah lahir sebagai kritik atas positivisme yang sebenarnya menindas masyarakat. Teori kritik yang dikembangkan Jürgen Habermas (1971, 1974, 1979) dan para pendahulunya, sebagai contoh, sangat tidak percaya pada positivisme yang mengangungkan ilmu pengetahuan bebas nilai dan kepentingan. Sebaliknya, menurut teori kritik, setiap pengetahuan membawa kepentingan. Menurut teori kritik, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan ideologi merupakan tiga hal yang saling bertautan dan ketiganya terkait pada praksis kehidupan sosial manusia. Pengetahuan merupakan aktivitas, proses, kemampuan dan bentuk kesadaran manusiawi, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan bentuk pengetahuan yang direfleksikan secara metodis. Jika pengetahuan dan ilmu pengetahuan membeku (karena positivisme) menjadi delusi atau kesadaran palsu yang merintangi praksis sosial untuk mewujudkan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan dan kebebasannya, maka keduanya telah berubah menjadi ideologi. Teori kritik sangat berkepentingan membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan ideologi (positivisme) itu melalui kritik ideologi. Kepentingan teori kritik disandarkan pada prinsip bahwa manusia sebagai spesies punya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan ideologis melalui perantara kekuasaan, dan kepentingan ini tampil dalam bentuk pengetahuan analitis yang disistematiskan secara metodis menjadi ilmu-ilmu sosial kritis-humanistik.

Konsep pemberdayaan sebenarnya sangat diilhami, atau paling tidak, bisa dilacak dengan teori kritis di atas. Pemberdayaan sebagai bentuk keberpihakan ilmu sosial dan ilmuwan sosial sangat diilhami oleh kepentingan emansipatoris, tindakan revolusioner dan metodologi refleksi-diri yang dikembangkan oleh teori kritik. Kita tidak bakal memperoleh pemahaman tentang pemberdayaan bila



masih menggunakan kacamata positivisme, karena aliran ini hanya mempunyai kepentingan teknis, tindakan rasional dengan dukungan metodologi empiris-analitis, serta bermacam habis-habisan keberpihakan. Ketika pemberdayaan menjadi wacana, kerangka kerja dan metodologi teori kritik tersebut sering digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi sosial, misalnya melalui *action research* dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR antara lain menganjurkan penelitian bersama antara peneliti dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah lokal, menguraikan, menganalisis dan sekaligus memecahkan masalah bersama-sama. Dengan demikian, PAR yang berbasis pada teori kritik itu mengutamakan pendekatan intersubektivitas, sebagai proses bersama untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut teori kritik ini adalah sebuah upaya refleksi-diri dan emansipatoris untuk mewujudkan kesadaran kritis yang bisa dicapai dengan “pendidikan pembebasan” seperti dibayangkan Paulo Freire.

## **B. Prinsip Pemberdayaan**

Pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita sebut ketahanan nasional.



Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata.

Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan publik (*public policies*) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang.

### **C. Pendekatan Pemberdayaan**

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

*Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan*



1. Upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantumempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik dengan pendekatan *komprehensif rasional* maupun *inkremental*.

Dalam pengertian pertama (*komprehensif rasional*), dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengeralahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.



Dengan pendekatan yang kedua (*incremental*), perubahan yang diharapkan tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah *advokasi*. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam system hukum, di mana penasihat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut.

Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumber daya tidak sama (Catanese and Snyder, 1986). Kemajemukan atau *pluralisme* inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini kegagalan pemerintah sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah yang seragam kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Ketidakpedulian terhadap heterogenitas masyarakat, mengakibatkan individu-individu tidak memiliki kemauan politik dan hanya segelintir elit yang terlibat dalam proses pembangunan.



Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk "penyadaran" secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan.

#### **D. Model Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga model.

*Pertama, Model Pemberdayaan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).* Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

*Kedua, Model Pemberdayaan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).* Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik,



seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan *"The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning"*.

Ketiga, Model Pemberdayaan untuk memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).



Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

### **E. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

#### **Bentuk - Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.

Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi



sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri

*Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat*

Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipati yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- Cakupan : Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

- Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*): Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- Transparansi : Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*): Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

- Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*): Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

- Pemberdayaan (*Empowerment*): Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- Kerjasama : Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.



## **F. Prinsip Dasar Pemberdayaan**

Ada beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri.

### **1. Penyadaran**

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangun dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangun dari "tidur" keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan Masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

### **2. Pelatihan**

Pendidikan disini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh Pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita.



### 3. Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih keterampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Masyarakat tidak mungkin diorganisir tanpa pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara rutin untuk mengambil keputusan-keputusan dan melihat apakah keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan. Wakil-wakil dari semua kelompok harus berpartisipasi dalam proses Pembuatan keputusan. Selain pertemuan-pertemuan rutin, catatlah keputusan-keputusan yang telah diambil. Notulen itu akan dibacakan dalam pertemuan berikutnya untuk mengetahui apakah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut sudah melaksanakan tugasnya atau belum.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

### 4. Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada Penyadaran, Latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata "kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan".

Pada saat masyarakat merasa memiliki Potensi atau kekuatan, mereka tidak akan mengatakan lagi, "kami tidak bisa", tetapi mereka akan berkata "kami mampu!". Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada kondisi seperti ini bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dsb. Hanya sebagai sarana perubahan sikap.



Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk Pembangunan sudah dimenangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan masyarakat harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

#### 5. Membangun Dinamika

Dinamika orang miskin berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Dalam bukunya "Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan" (Owin Jamasy, 2004) dikatakan bahwa para pelaku program pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan aksi program. Dikatakannya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan kekuatan internal pelaku pemberdaya.

Pertama, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur stakeholders, harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil).

Kedua, seluruh unsur stakeholders harus jujur (jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain). Kejujuran adalah sifat dasariah manusia, namun seringkali berubah (menjadi tidak jujur) karena terkalahkan oleh kepentingan emosi pribadinya.

Ketiga, kemampuan melakukan problem solving, menumbuhkan dan memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi, dan social marketing. Memecahkan masalah (problem solving) adalah proses bagaimana semua pihak menerima jalan keluar yang ditawarkan.



Keempat, kerjasama dan koordinasi seluruh unsur stakeholders berdasarkan kemitraan. Kendatipun ada struktur pengelolaan program dengan berbagai atribut jabatannya, namun dalam proses perjalanannya harus berlangsung secara kemitraan.

Kelima, partisipasi aktif dari seluruh unsur stakeholders. Partisipasi tidak hanya diukur oleh jumlah melainkan harus juga diukur oleh seberapa banyak elemen masyarakat yang terlibat, misalnya dari latar belakang jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), latar belakang usia (tua dan muda), latar belakang sosial-ekonomi (kaya menengah dan miskin) dan lain sebagainya.

Keenam, lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu. Keterpaduan ini diawali dengan ketajaman analisis dalam melihat persoalan. Keterpaduan dari sudut pandang "tujuan" mengandung arti bahwa tujuan pemberdayaan harus meliputi aspek intelektual, aspek sosial-ekonomi, aspek fisik, dan aspek manajerial.

Ketujuh, mengutamakan penggalan dan pengembangan potensi lokal. Pengembangan potensi lokal untuk merintis kemandirian dan memperkecil terjadinya ketergantungan kepada pihak luar. Pengembangan potensi lokal yang konsisten, juga mengandung maksud agar masyarakat sadar bahwa kontribusi itu jauh lebih realistis untuk tujuan rasa memiliki.

Kedelapan, aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (self-reliant development). Kenyataan banyak sekali bentuk kemampuan yang bisa diswadayakan oleh masyarakat misalnya: tenaga, ide dan pemikiran, uang, dan kepemilikan (tanah dan harta lainnya).

Kesembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan berkesinambungan. Program pembinaan dikonstruksi bersama oleh semua pihak sehingga dapat dipastikan bahwa antara satu bentuk pembinaan dengan bentuk yang lainnya akan berkorelasi positif, saling mendukung dan berkesinambungan.

Kesepuluh, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap. Tahapan kegiatan sebaiknya dibuat bersama masyarakat. Fasilitator dapat menggabungkan antara waktu yang

tersedia bagi program dan yang tersedia pada masyarakat. Tahapan kegiatan tidak akan berpengaruh kepada waktu yang disediakan. Justru dengan tahapan itulah akhirnya seberapa sempitpun waktu yang disediakan, akhirnya dapat dikonsumsi atau dibagi dengan adil.

Kesebelas, seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan. Pola ini harus dibedakan dengan pola kerja pada pembangunan fisik. Pemberdayaan adalah untuk kepentingan manusia seutuhnya. Oleh karena itu pola dan cara kerja harus mampu menyentuh kepada seluruh kepentingan masyarakat (SDM, ekonomi dan material serta manajerial)

Keduabelas, komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu (*Sense of mission, sense of community, and mission driven profesionalisme*).

#### **G. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

1. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
2. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.



## **H. Penguatan Kapasitas**

1. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**  
Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial politik.
2. **Pengembangan kemampuan dalam permodalan**  
Kegiatan pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan masyarakat mampu menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta berusaha dalam sistem pasar. Penguatan modal usaha dapat diberikan dalam bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman tergantung kemampuan kelompok. Dana ini dikelola secara langsung oleh kelompok untuk dipergunakan secara bersama.
3. **Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat**  
Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang dapat dilakukan melalui pembinaan kepada petani di bidang ekonomi secara berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya, dan mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian. Di samping itu pembinaan diarahkan agar kelompok mampu mengelola usaha bersama melalui kursus-kursus dan pelatihan teknis, sehingga mampu mengembangkan usahanya melalui kegiatan temu usaha, pameran dalam rangka memasarkan hasil usahanya.

### **I. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
- b. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*).
- c. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna,
- d. Mendekatkan masyarakat dengan pasar,
- e. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

### **J. Tanggungjawab Stakeholders dalam Pemberdayaan**

1. Keberhasilan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah *resultante* dari semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan setiap instansi, sehingga menuntut adanya sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terjalin antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini harus diwujudkan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial budaya.
2. Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada pada pundak pemerintah daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang lebih mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi mereka. Dengan desentralisasi kegiatan pembangunan, selayaknyalah pemerintah daerah lebih banyak memberikan prioritas pada pembangunan yang berbasis pada masyarakat.
3. Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat bukan hanya pada tangan pemerintah tetapi juga pihak-pihak *non* pemerintah yaitu, masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik Negara dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Tanggung jawab membangun masyarakat pada hakekatnya merupakan tanggung jawab utama masyarakat itu sendiri.



Supaya pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat maka pemerintah hanya mempersiapkan dan memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna perberdayaan, yaitu mengembangkan apa yang telah ada pada masyarakat menjadu lebih besar skalanya, lebih ekonomis dan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

### BAB III

## KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

#### A. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.



3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Riant Nugroho (2008: 164), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah :

- a. meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini,
- b. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan,
- c. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri,
- d. meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha home industry. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) lima langkah tersebut yaitu :

1. membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan,
2. membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk,
3. memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha,
4. mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal,
5. membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho (2008:165-166) adalah :

1. penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol,
2. peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat,
3. pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan,
5. peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga



skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam home industry, hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif. Penciptaan iklim yang kondusif tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki,
- b. menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya,
- c. tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat (Roosganda Elizabeth, 2007:131).

## **B. Strategi Pemberdayaan Perempuan**

Pada dasawarsa "70-an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah "Perempuan dalam Pembangunan".

Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan (Women in Development/WID) karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga yang posisinya yang termarginalisasi perlu diikutsertakan ke dalam pembangunan. Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi kalangan liberal dari Barat sangat terasa pengaruhnya dengan pendekatan WID ini. Pada saat itu proyek-proyek yang ada berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan khususnya



perempuan dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. "Proyek yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perempuan ini contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, menyulam dan lain sebagainya" (Riant Nugroho, 2008: 137-138).

Dalam realisasinya konsep WID gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek pembangunan, maka dari itu konsep Gender and Development (GAD) sebagai follow-up nya (2008: 140). Dalam konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah perempuan semata. Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai "pemberdayaan". Menurut Julia Cleves "Pemberdayaan ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas (bottom-up) dari pada pemberdayaan dari atas ke bawah (top-down)" (Julia Cleves Moss, 1996: 209-210).

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan.

Tabel 1. *Women in Development (WID) & Gender and Development (GAD).*

	<b>WID</b>	<b>GAD</b>
Pendekatan	□ Berusaha mengintegrasikan perempuan ke dalam	□ Berusaha memberdayakan dan mentransformasi
Fokus	□ Perempuan	□ Hubungan antara pria dan



Permasalahan	<input type="checkbox"/> Pengesampingan perempuan dari proses pembangunan.	<input type="checkbox"/> Hubungan kekuatan tak setara yang menghalangi pembangunan yang layak dan partisipasi penuh
Sasaran	<input type="checkbox"/> Pembangunan yang lebih efisien dan efektif.	<input type="checkbox"/> Pembangunan yang layak dan berkelanjutan. <input type="checkbox"/> Pria dan wanita berbagi dalam pengambilan keputusan dan
Strategi	<input type="checkbox"/> Menerapkan proyek-proyek perempuan, unsur-unsur perempuan, dan proyek-proyek terpadu. <input type="checkbox"/> Meningkatkan produktivitas dan penghasilan perempuan. <input type="checkbox"/> Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangganya.	<input type="checkbox"/> Mengidentifikasi dan memperuntukkan kebutuhan jangka pendek yang ditentukan oleh pria dan wanita untuk meningkatkan kondisi mereka. <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi dan memperuntukkan kepentingan pria dan wanita untuk jangka panjang.

Sumber : Riant Nugroho (2007: 179)

### C. Pendekatan Efisiensi terhadap *Women in Development* (WID)

Pendekatan efisiensi terhadap perempuan dalam pembangunan dinyatakan berdasarkan kebijakan Overseas Development Administration (ODA) yang tercatat tahun 2009 dan berbunyi :

*Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan*

“...Perempuan memegang kunci bagi masyarakat yang lebih produktif dan dinamis. Jika mereka sendiri sehat dan berpengetahuan, serta memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, keterampilan dan kredit, mereka akan lebih produktif secara ekonomis...” (Julia Cleves Moss, diterjemahkan oleh Hatian Silawati, 1996: 206).

Pendekatan efisiensi berkerja pada dua tingkat yang berbeda. Untuk memastikan efisiensi dalam proyek pembangunan menuntut keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efisien dan setia dibanding laki-laki. Aspek kedua adalah kebijakan pembangunan pada tingkat makro menuntut efisiensi dan produktivitas dalam program penyesuaian struktural (1996: 207).

#### **D. Pendekatan Pemberdayaan atau *Gender and Development* (GAD)**

Pendekatan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan adalah dalam hal kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam pendekatan pemberdayaan berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan, yang mengarah pada mobilitas politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (1996: 210).

Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan maka ada 4 (empat) langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment);
- b. Kesetaraan Gender (Gender Equality);
- c. Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (Affirmative Action);
- d. Harmonisasi atau Sinkronisasi Peraturan/Perundang-undangan dan Kebijakan (Synchronization of Regulations and Policies). (Program Pemberdayaan Perempuan Biak Tahun 2006-2007).

Adapun menurut Delly Maulana (2009: 46) menyebutkan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan produktivitas perempuan yaitu :



- a. pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan atau kelompok,
- b. program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok,
- c. pengembangan kelembagaan keuangan mikro di tingkat lokal,
- d. penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif,
- e. pengembangan usaha yang berkesinambungan,
- f. pelibatan keluarga atau suami kelompok sasaran,
- g. keterpaduan peran serta seluruh stakeholders,
- h. penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha,
- i. fasilitas bantuan, permodalan bersifat bergulir untuk pemupukan permodalan,
- j. pemantapan serta pendampingan untuk kemandirian kelompok.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan diperlukan keberpihakan dari pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan teori Gender and Development, dimana teori ini tidak hanya menfokuskan pada perempuan tetapi juga fokus terhadap keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

### **E. Implementasi Pemberdayaan Perempuan**

Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model Gender and Development. Dalam pendekatan ini bertujuan memahami pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dari diri perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan pada perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat. Sebagai contoh adalah kegiatan pemberdayaan perempuan di Ahmedabad, Gujarat, India. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Self-Employed Women's Association (SEWA). Sebelum adanya pemberdayaan, perempuan di Ahmedabad berkerja sebagai pemulung kertas. Hasil yang diperoleh dari memulung hanya 10 persen dari nilai kertas yang dikumpulkan. Melalui asosiasi SEWA, perempuan di Ahmedabad diberikan bantuan



untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan pelatihan serta mendirikan bank sendiri untuk komunitas mereka. Namun dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan, perempuan masih dihadapkan pada banyaknya korupsi dan kendala, ketika orang dengan kepentingan pribadi menghentikan jalan mereka.

Menghadapi bermacam-macam tekanan ini, pemulung kertas mengorganisasikan diri dalam serangkaian kerja sama. Dengan memanfaatkan kekuatan dan posisi kolektif, mereka menggunakan solusi imajinatif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pada bersandar pada niat baik agar mereka mendapat akses terhadap kertas. Mereka justru meneliti sistem tender dan belajar bagaimana bersaing dengan para kontraktor dengan kondisinya sendiri dan mereka berjuang agar terbebas sepenuhnya dari perantara serta berharap agar mempunyai pabrik sendiri untuk memproses kembali kertas mereka. Adanya kekuatan mereka yang terpadu dan tak kenal nyerah, para pemulung tersebut menjadi diri mereka sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dimata pemerintah, kontarktor dan diri mereka sendiri.

Pada saat yang sama, SEWA bekerja dengan pemulung kertas guna menemukan cara-cara alternatif peningkatan pendapatan. Dari adanya usaha pemberdayaan tersebut, perempuan di Ahmedabad saat ini telah mampu hidup lebih baik. Mereka telah mampu memperoleh harga yang lebih baik untuk kertasnya serta mampu mendirikan koperasi. "Empat koperasi baru para mantan pemulung kertas terbentuk : penenunan, kebersihan, kabel elektronik dan produksi file" (Julia Cleves Mosse. 2007: 211-213).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemberdayaan cukup penting untuk meningkatkan kemandirian perempuan khususnya di bidang ekonomi. Peran adanya lembaga atau organisasi serta keberpihakan dari laki-laki mampu membuat perempuan meningkatkan kualitas hidupnya yang pada akhirnya dapat berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi keluarga.



#### F. Peran Lembaga Keuangan Mikro

Todaro (1983) mengatakan pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional. Pada pelaksanaannya konsep pembangunan tersebut masih jauh dari kenyataan. Berbagai temuan empiric menunjukkan masih terjadi marginalisasi kehidupan masyarakat terutama kaum miskin baik dipertanian maupun perdesaan.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *microcredit*.

Dengan demikian, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (KrisnaWijaya:2005).

Menurut Marguiret Robinson (2000) dalam Wiloejo (2005), pinjaman dalam bentuk *microcredit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat



perbedaan klasifikasi diantara mereka,yang mencakup: pertama,masyarakat yang sangat miskin (*theextreepoor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua,masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*),dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda- beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan,subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga,lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelakuUsaha Menengah maupun Besar.

Keberadaan LKM menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Menurut Krishnamurti (2003) sebagaimana dikutip oleh Ashari (2006: 153) menyebutkan peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui:

1. Tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befluktuasi
2. Mengelola risiko dengan lebih baik
3. Secara bertahap memiliki kesempatanuntuk membangun aset
4. Mengembangkan kegiatan usaha mikronya
5. Memperkuat kapasitas perolehan pendapatannya
6. Dapat merasakan tingkathidup yang lebih baik.

Tanpa akses yang cukup pada LKM, hampir seluruh rumah tangga miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak atau pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin berpartisipasi dan mendapat manfaat dari peluang pembangunan. Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di sektor pertanian justru



seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ashari (2006: 152) menyatakan bahwa "Potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar." Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut, yaitu:

1. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa.
2. Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur.
3. Karakteristik umumnya membutuhkan platform kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM.
4. Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah.
5. Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal- emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Kontribusi Usaha mikro dan kecil dalam perkembangan perekonomian secara nasional maupun lokal sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah usaha mikro dan kecil yang mendominasi struktur perekonomian secara nasional maupun lokal. Hasil sensus ekonomi BPS tahun 2006 tercatat bahwa dari total sebanyak 22.513.552 perusahaan/usaha, 99 persen masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK). Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa PDB UKM tahun 2014 mencapai Rp 2.609 triliun, di mana sebesar Rp 1.505 triliun di antaranya disumbangkan oleh unit-unit usaha mikro. PDB UKM ini lebih besar dibanding PDB yang



dihasilkan unit-unit usaha besar secara kumulatif yang mencapai Rp 2.087 triliun. Pada tingkat lokal dominasi UMK semakin dominan, apalagi di tingkat pedesaan. Pemberdayaan ekonomi pedesaan tidak terlepas dari pemberdayaan UMK yang berada di pedesaan tersebut.

Tidak bisa dibantahkan bahwa UMKM merupakan pilar perekonomian nasional dan lokal. Daya tahan UMKM terhadap krisis juga telah terbukti cukup tangguh. Meskipun demikian upaya-upaya pengembangan UMKM masih menjadi kendala. Ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh UMKM: masalah permodalan, pemasaran dan bahan baku (Ismawan, 2003).

Beberapa penyebab sulitnya UMKM memperoleh tambahan modal kerja maupun investasi dikarenakan:

- 1) UMKM masih belum memiliki laporan keuangan yang tersusun baik beserta kelengkapan administrasi pendukungnya (bukti-bukti transaksi keuangan).
- 2) Kebanyakan di antara UMKM masih belum bisa menyusun business plan yang baik sebagai salah satu syarat ketentuan pengajuan proposal pembiayaan kredit usaha,
- 3) Beberapa UMKM khususnya pemilik usaha mikro dan kecil, banyak yang tidak memiliki agunan sebagai salah satu syarat jaminan pengucuran kredit oleh lembaga keuangan.

Di sisi lain, lembaga keuangan mempunyai kendala juga di dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Kendala penyaluran kredit lembaga keuangan terhadap UMKM terlihat dari masih rendahnya nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Ada banyak perdebatan mengenai penyebab rendahnya LDR. Perdebatan yang mengemuka di antaranya saling menimpakan penyebab tersebut pada pihak lain. Pihak UMKM menyatakan bahwa pihak perbankan memberikan persyaratan pengajuan kredit yang terlalu menyulitkan UMKM. Salah satu syarat pengajuan kredit yang paling dirasakan sulit dipenuhi oleh UMKM khususnya mikro dan kecil adalah agunan. Sementara di sisi lain, pihak perbankan menyatakan bahwa mereka telah membuka peluang seluas-luasnya bagi UMKM untuk mengajukan penambahan modal usaha. Pihak perbankan menyatakan juga bahwa rendahnya LDR disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit dari pengusaha itu sendiri.



Perdebatan mengenai pihak mana yang sebenarnya mengakibatkan rendahnya realisasi penyaluran dana UMKM tidak terlalu penting untuk dikemukakan. Alangkah baiknya apabila masing-masing pihak justru saling bekerjasama. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai kepentingan dalam mengoptimalkan penyaluran dana UMKM. Pihak UMKM berkepentingan untuk meningkatkan modal usahanya. Pihak perbankan berkepentingan untuk menyalurkan dana tersebut. Saat ini yang dibutuhkan adalah adanya kerjasama antara berbagai pihak untuk berkomitmen mengembangkan UMKM melalui kompetensi yang dimilikinya masing-masing.

Sedikitnya ada tiga pihak (tiga pilar) yang diharapkan dapat bekerjasama dengan baik untuk bersama-sama mengembangkan UMKM. Ketiga pilar tersebut adalah lembaga keuangan, lembaga pendamping bisnis dan pemerintah. Masing-masing pihak mempunyai peran utama masing-masing.

Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak yang sebenarnya juga berkepentingan dalam kegiatan usahanya mempunyai peran membantu UMKM dari sisi penambahan modal usaha, baik modal kerja maupun investasi. Lembaga keuangan yang dimaksud di sini adalah bank dan non bank. Lembaga keuangan dapat memberikan pelatihan bagi UMKM dalam menyusun proposal pengembangan usaha yang feasible. Sosialisasi kepada UMKM harus terus dilakukan oleh lembaga keuangan terkait dengan prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya.

Pilar kedua dalam pengembangan UMKM adalah lembaga pendamping bisnis (Business Development Services Provider). Lembaga pendamping bisnis ini berperan utama dalam membantu UMKM meningkatkan kesehatan dan kinerja usahanya. Peran lain dari lembaga pendamping bisnis adalah:

- 1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) UMKM.
- 2) membantu UMKM menyusun administrasi keuangan yang tertata dengan baik.
- 3) membantu UMKM menyusun business plan,
- 4) mendampingi UMKM dalam mengajukan proposal pengembangan usaha kepada lembaga keuangan,

Ada banyak pihak yang dapat dimasukkan dalam pilar kedua ini, antara lain: lembaga swadaya masyarakat (LSM), pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi. Program sarjana masuk desa akan menjadi bagian cukup penting dalam meningkatkan kapasitas UMK di pedesaan.

Pilar ketiga adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Peran penting lainnya adalah menciptakan berbagai kebijakan melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya. Pemerintah daerah juga dapat membantu pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan ekonomi yang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM di daerahnya.

Pemerintah pusat dan daerah dapat membantu UMKM melakukan promosi hasil usahanya dalam lingkup nasional maupun internasional.

Selain menjalin kerjasama yang kuat antar lembaga yang terkait dengan pengembangan UMKM, juga dituntut adanya perubahan paradigma setidaknya cara pandang dalam memahami permasalahan UMKM. UMKM memiliki karakteristik usaha yang bermacam-macam. Oleh karenanya diperlukan skema pembiayaan yang bermacam-macam pula sesuai dengan karakter usaha yang mereka tekuni. Sebagai contoh, karakter usaha kerajinan berbeda dengan trading, pertanian, peternakan, industri pengolahan dan jenis usaha lainnya. Masing-masing jenis usaha membutuhkan skema pembiayaan yang mestinya tidak seragam.

Kalangan lembaga keuangan dituntut untuk lebih kreatif mengembangkan berbagai model pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah oleh UMKM. Perbankan dituntut berpikir kreatif dengan keterbatasan aturan yang membelitnya untuk memproduksi berbagai skim pembiayaan yang kapabel bagi UMKM. Bukan sebaliknya, UMKM dituntut untuk memenuhi syarat-syarat bank teknis yang kadang sulit dijangkau oleh sebagian besar UMKM. Perbankan yang memiliki basis pendidikan lebih baik dibandingkan



pelaku UMKM, semestinya melakukan penyesuaian terhadap berbagai aturan yang mereka buat. Selanjutnya, berbagai macam skema pembiayaan tersebut harus disosialisasikan kepada para UMKM melalui berbagai macam media. Melalui kegiatan ini diharapkan *asymmetric information* yang terjadi selama ini dapat dikurangi hingga batas minimal. Wajah perbankan kita diharapkan dapat berubah lebih ramah bagi UMKM.

Harus disadari bahwa tidak berhasilnya target pengucuran kredit ke UMKM selama ini lebih dikarenakan masih sulitnya UMKM memenuhi persyaratan bank teknis (UMKM dianggap belum bankable). Anggapan ini harus diubah menjadi sebenarnya perbankanlah yang belum UMKMable. Perubahan sudut pandang ini mensyaratkan bahwa selain UMKMnya dituntut untuk berubah lebih tertib dan baik, perbankan juga harus melakukan perubahan. Tuntutan agar UMKM menjadi bankable seharusnya bukan sebagai jurang yang terjal bagi UMKM yang benar-benar memerlukan uluran tangan perbankan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Sebaliknya, perbankan juga dituntut untuk berempati dan jeli dalam menangkap peluang bisnis yang dikelola oleh para UMKM.

Melalui kerjasama tripilar dan perubahan sudut pandang di atas, diharapkan *asymmetric information* antara perbankan dengan UMKM selama ini akan semakin berkurang. Hubungan antara perbankan dengan UMKM menjadi lebih mesra sehingga akan menguntungkan keduanya pada khususnya dan perekonomian bangsa pada umumnya. Tanpa adanya kemauan untuk saling memahami dan mendekatkan diri, maka jarak antara perbankan dan UMKM akan tetap terus lebar. Akhirnya, hanya sedikit UMKM yang dapat mengakses pembiayaan usaha ke bank.

Peran LKM dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMK di Pedesaan

Usaha Mikro dan Kecil menjadi basis perekonomian pedesaan. Karakteristik UMK di pedesaan sebagian besar dicirikan dengan kegiatan usaha di sektor pertanian. Pengelolaan kegiatan ekonomi pedesaan secara umum dan produksi pertanian secara khusus, dihadapkan pada kenyataan bahwa proses transformasi dari input menjadi output (proses produksi) berlangsung dalam jangka waktu



lama. Hasil produksi dan penjualan tidak menentu, terjadi volatilitas pasar komoditas pertanian. Kemampuan pengelolaan usaha pertanian dan rumah tangga pedesaan masih terbatas, belum banyak inovasi. Pelaku UMK masih terus dihadapkan pada permasalahan-permasalahan input dan pemasaran.

Ketika UMK di pedesaan ingin mengembangkan usahanya, permasalahan pembiayaan atau permodalan selalu muncul. Keterbatasan layanan pembiayaan/permodalan menyebabkan rumah tangga pedesaan terjebak pada layanan jasa pinjaman dengan bunga tinggi. Perbankan komersial sulit membiayai UMK karena masalah persyaratan bank teknis, seperti: catatan administrasi keuangan, laporan keuangan dan jaminan. Keberadaan LKM sangat dibutuhkan karena memberikan fleksibilitas persyaratan dan pembayaran yang lebih baik dibandingkan bank komersial.

Lembaga Keuangan Mikro berperan membantu pelayanan jasa keuangan pada masyarakat pedesaan. Ketersediaan layanan pembiayaan di pedesaan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan usahanya.

Lembaga Keuangan Mikro sedikitnya memiliki tiga peran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan: 1) sebagai lembaga perantara keuangan di pedesaan, 2) sebagai lembaga perantara sosial di pedesaan, dan 3) sebagai agen pembangunan ekonomi pedesaan. Sebagai lembaga perantara keuangan, LKM memperbesar akses pelayanan jasa keuangan pada masyarakat desa. Masyarakat bisa memanfaatkan jasa LKM untuk menyimpan uangnya dan mengajukan pembiayaan untuk peningkatan usahanya. Sebagai lembaga perantara sosial, LKM melakukan pembinaan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Lembaga Keuangan Mikro melakukan pelatihan dan pendampingan usaha masyarakat. Sebagai agen pembangunan ekonomi pedesaan, LKM berperan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pedesaan berputar di wilayah tersebut. Berbeda dengan bank komersial, penghimpunan dan penyaluran dana bisa banyak berbeda. Bank komersial menghimpun dana masyarakat pedesaan untuk disalurkan ke masyarakat perkotaan. Lembaga Keuangan Mikro juga berperan dalam meningkatkan produktivitas



usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi dan menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Membangun Lembaga Keuangan Mikro yang Sehat dan Kuat Lembaga Keuangan Mikro dibutuhkan oleh UMK untuk pengembangan usaha. Namun demikian, LKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu: masalah kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM). Saat ini yang dikenal luas dan diakui secara umum oleh lembaga-lembaga bisnis adalah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi dan bank. Bertransaksi dengan kedua lembaga keuangan tersebut dianggap relatif aman daripada bertransaksi dengan lembaga keuangan yang badan hukumnya belum jelas.

Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 menyisakan permasalahan terkait status badan hukum lembaga-lembaga keuangan mikro yang belum memenuhi persyaratan permodalan untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Banyak LKM yang menghadapi ketidakjelasan status badan hukum ini. Mereka dihadapkan pada tiga pilihan: 1) berbadan hukum bank, 2) berbadan hukum koperasi, atau 3) tidak memiliki badan hukum. Apabila pilihannya adalah berbadan hukum bank, diperlukan modal yang cukup besar untuk mendirikan BPR. Tidak semua LKM yang ada cukup mampu memenuhi persyaratan pendirian BPR ini. Jika pilihannya adalah mendirikan koperasi, persyaratan administratif yang sulit terpenuhi. Koperasi adalah kumpulan orang dan modal. Tidak jarang LKM yang mengajukan pendirian koperasi melakukan rekayasa terhadap persyaratan administratif khususnya pada para pendiri koperasi dan anggota koperasi. Banyak ditemukan anggota koperasi non aktif sepanjang umur. Koperasi yang didirikan oleh komunitas yang beragam menghadapi kendala komunikasi dan kepatuhan terhadap peraturan organisasi.

Mengingat kendala-kendala di atas, masih banyak LKM yang terus beroperasi tanpa status badan hukum yang jelas. Keberadaan LKM ini di satu sisi membawa banyak manfaat untuk pengembangan



UMK, tapi di sisi lain tidak diakui oleh entitas bisnis formal. Badan Usaha Milik Desa menjadi alternatif solusi memecahkan kebuntuan ketidakjelasan status badan hukum LKM. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum.

BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Ada beberapa peran BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, antara lain: (i) peningkatan kualitas SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDES telah mampu memperkuat kelembagaan ekonomi dan keuangan di pedesaan. Namun BUMDES masih menyisakan permasalahan terkait pengakuan oleh entitas bisnis formal lainnya. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan, BUMDES masih belum mendapatkan kepercayaan dari entitas bisnis formal. Bertransaksi dengan BUMDES dianggap masih belum aman. Entitas bisnis formal masih merasa lebih aman bertransaksi dengan koperasi dan perbankan yang sudah jelas-jelas kuat badan hukumnya. Masih banyak yang belum mengenal keberadaan BUMDES ini. Sosialisasi mengenai BUMDES ini harus terus dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dan lembaga bisnis.

Permasalahan kedua untuk membangun LKM yang sehat dan kuat adalah aspek SDM. Kualitas SDM yang baik merupakan kunci dari suksesnya bisnis LKM. Banyak LKM yang tidak berkembang atau setelah berkembang besar kemudian ambruk karena masalah SDM ini. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan, kepercayaan tumbuh karena sebuah bisnis dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya.



Peningkatan kualitas SDM sebuah LKM menjadi kunci dari suksesnya bisnis LKM. Melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan secara terus menerus pada pengelola LKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM.

## BAB IV

### METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### A. Pengertian PAR

PAR adalah singkatan dari *Participatory Action Research*, yaitu merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam PAR perlu melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain-lain yang terkait.

Pada dasarnya *Participation Action Research* (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif bersama-sama tindakan saat ini ( yang mereka alami sebagai bermasalah ) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lainnya yang dapat di pahami. *Participatory action Research* tidak hanya melihat apa yang diharapkan akan diikuti oleh suatu tindakan. Hal ini adalah tindakan yang harus diteliti, diubah dan kemudian diteliti kembali, dalam proses penelitian di lakukan oleh para peserta.

Hal ini juga bukan hanya sekadar varian dari konsultasi eksotis. Sebaliknya, bertujuan untuk menjadi aktif dengan adanya penelitian oleh dan untuk orang-orang yang akan membantu. Ini juga tidak dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan sekelompok orang lain untuk melakukan apa yang pikiran terbaik untuk mereka , apakah itu adalah untuk menerapkan kebijakan pusat atau suatu organisasi atau perubahan layanan. Sebaliknya adalah mencoba untuk menjadi orang yang benar-benar demokratis



atau non-koersif proses di mana orang-orang yang akan membantu, menentukan tujuan dan hasil penyelidikan mereka sendiri.

Asal muasal *action research* tidak jelas dalam suatu literatur. Pengarang seperti Kemmis dan Mc Taggart (1988), Zuber-Skerrit (1992), Holer dan Schwartz-Barcott (1993) menyatakan bahwa *action research* berasal dari Kurt Lewin, seorang psikolog Amerika. McKernan (1988 seperti disitasi dalam McKernan 1991) menyatakan bahwa *action research* sebagai sebuah *method of inquiry* telah berkembang pada abad lalu dan studi literatur memperlihatkan "dengan jelas dan meyakinkan bahwa *action research* berakar pada derivatif dari metode ilmiah" yang berhulu kepada gerakan ilmu pendidikan pada akhir abad 19." (McKernan 1991:8).

McKernan (1991) juga menyatakan bahwa ada bukti bahwa dimana penggunaan *action research* oleh sejumlah reformis sosial sebelum lewin, seperti Collier tahun 1945, Lippitt and Radke tahun 1946 dan Corey tahun 1953. Mc Taggart (1992) mensitasi karya Gstettner and Alltricher menggunakan *group participation* pada tahun 1913 pada sebuah inisiatif pengembangan komunitas prostitusi di Vienna. Freideres (1992) memasukan konsep *participation research* yang muncul tahun 1970 dari pengembangan lebih lanjut dari pengalaman negara berpenghasilan rendah.

Meskipun masih berkabut asal mula *action research*, Kurt Lewin pada tahun 1940-an membuat teori *action research*, yang menjelaskan *action research* sebagai *proceeding in a spiral steps, each of which is composed of planning, actions, and the evaluation of the result of action* (Kemmis and Mc Taggart 1990). Lewin berargumentasi bahwa dalam rangka memahami dan merubah paksis-praksis sosial tertentu, ilmuwan sosial harus memasukkan praktisioner dari dunia sosial nyata dalam semua fase penyelidikan (McKernan 1991). Konstruksi dari teori *action research* oleh Lewin ini membuat *action research* menjadi sebuah metode penyelidikan yang dapat diterima (McKernan 1991).

*Participation Action Research* (PAR) adalah suatu cara membangun jembatan untuk menghubungkan orang. Jenis penelitian ini adalah suatu proses pencarian pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami kondisi sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi.



PAR (*Participation Action Research*) adalah suatu metoda penelitian dan pengembangan secara partisipasi yang mengakui hubungan sosial dan nilai realitas pengalaman, pikiran dan perasaan kita. Penelitian ini mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini mengakui bahwa proses perubahan adalah sebuah topik yang dapat diteliti. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

PAR (*Participation Action Research*) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. PAR (*Participation Action Research*) adalah “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. PAR(*Participation Action Research*) adalah partisipatif dalam arti bahwa ia sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial (komunitas) yang tengah berada di bawah pengkajian, dan bahwa mereka berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi rencana aksi itu didasarkan pada hasil penelitian. PAR(*Participation Action Research*) dikenal dengan banyak nama, termasuk *participation research*, *action research*, *collaborative inquiry*, *collaborative action research*, *emancipatory research*, *action learning*, *contextual action research*; semuanya itu hanyalah variasi dalam tema yang sama.

PAR (*Participation Action Research*) adalah ‘seni’ membangun jembatan mencapai pemahaman yang saling menguntungkan, menghubungkan orang, gagasan, dan sumber; membangun hubungan melalui itu kita dapat menciptakan landasan yang kokoh antara perorangan dan komunitas, bekerja menuju solusi yang saling menguntungkan atas masalah bersama, dan belajar bagaimana untuk maju menyongsong masa dengan tana harus membuat ‘roda’, sambil melewati bermunculannya kembali kendala, secara esensial meraih suatu tingkat kesadaran yang tinggi dari mana kita menjadi berdaya untuk memecahkan masalah-masalah.



PAR (*Participation Action Research*) adalah sebuah *dual shift* yaitu sebuah pergeseran dalam paradigma penelitian kita maupun sebuah pergeseran dalam cara-cara kita mengejar pembangunan.

Paradigma pertama, PAR(*Participation Action Research*) merubah cara berpikir kita tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. PAR(*Participation Action Research*) itu sendiri adalah sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peranan kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial atau komunitas, yang tengah berada di bawah studi. 'Subjek' penelitian lebih baik untuk dirujuk atau menjadi rujukan sebagai anggota-anggota komunitas, dan mereka berpartisipasi dalam rancangan, implementasi, dan eksekusi penelitian. PAR(*Participation Action Research*) juga adalah sebuah pergeseran dalam pengertian bahwa ke dalamnya termasuk elemen aksi. PAR(*Participation Action Research*) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun penerapan informasi dengan mengambil aksi untuk menuju solusi atas masalah-masalah yang terdefiniskan. Anggota-anggota komunitas berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi dalam rencana tindak strategis didasarkan pada hasil penelitian.

Paradigma kedua, PAR(*Participation Action Research*) adalah proses dengan mana komunitas-komunitas berusaha mempelajari masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini biasa dilakukan kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas kita, justru dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi sebuah komunitas. Hubungan antara penelitian ilmiah (*intellectual research*) dapat menjadi *intrusive* dan *exclusive*. Kedua tipe penelitian ini juga dapat melenyapkan bagian-bagian penting dan vital dari sebuah proyek penelitian yakni pengalaman hidup nyata, mimpi, pikiran, kebutuhan, kemauan dari anggota komunitas. PAR(*Participation Action Research*) menawarkan metoda-metoda untuk merubah hakekat hubungan antara orang, dengan organisasi yang biasanya dikejar proyek penelitian dan pengembangan. Hubungan ini termasuk bagaimana kita memahami peran kita sebagai *facilitators*, bukan sebagai *experts*, bagaimana kita mengelola hubungan dengan



lembaga pendidikan dan lembaga bisnis, dan bagaimana kita bekerja satu sama lain sebagai siswa, guru, tetangga, dan anggota komunitas.

Dalam PAR terdapat tiga *features*, yakni *participation*, *action*, *research*.

1. **Participation** mengambil bentuk *inquirer decision-making* yang menggunakan '*the principle of equity*' (dipahami sebagai *co-existence and self determination*) untuk membawa *divergent contextual factors* dan *divergent interpretations* dari metodologi ke dalam tugas menggeneralisasi data (*subscribing to the 'relativist' characteristic of the paradigm*).
2. **Action** adalah *direct experience* dari partisipan dengan isu sebagaimana dipresentasikan dalam setiap kehidupan sehari-hari, dan bagaimana *participatory action research methods* dapat melibatkan secara langsung partisipan dengan dunia mereka.
3. **Research** adalah *process and form* menghasilkan pengetahuan dalam empat domain pengetahuan: *experiential, presentational, propositional, practical* (John Heron 1996), dan sebagaimana diarahkan oleh partisipan untuk pelananaan terbaik bagi kepentingan masyarakat. Pengetahuan dikembangkan melalui dialog reflektif dan analisis kritis yang dilakukan oleh partisipan yang terlibat dalam aksi (*subscribing to the hermeneutic and dialog characteristic of the paradigm*).

#### **B. Tipe-Tipe Participatory Action Research.**

Grundy (1988) mendiskusikan tiga mode PAR (*Participation Action Research*); *technical, practical, emancipatory*. Holter and Schwartz-Barcott (1993) juga mendiskusikan tiga tipe PAR (*Participation Action Research*), yakni: *technical collaborative approach, mutual collaborative approach, enhancement approach*. McKernan (1991) juga mendaftarkan tiga tipe *action research*: *scientific-technical view of problem solving; practical-deliberative action research; critical-emancipatory action research*. McCutcheon and Jurg (1990) mendiskusikan tiga perspektif tentang PAR: *positivist perspective, interpretivist perspective, critical science perspective*.



### 1. *Technical Collaborative*

Awal advokasi *action research* seperti Lippitt and Radke pada tahun 1946, Lewin tahun 1947, Corey tahun 1953, dan Taba and Noel tahun 1957 adalah menempatkan metode ilmiah tentang *problem solving* (McKernan 1991). Tujuan dari peneliti dalam pendekatan tersebut adalah untuk menguji intervensi tertentu didasarkan pada suatu *pre-specified theoretical framework*. 'Nature' dari kolaborasi antara peneliti dan praktisi adalah teknikal dan fasilitasi. Peneliti mengidentifikasi masalah dan intervensi spesifik, kemudian praktisi dilibatkan dan mereka sepakat untuk memfasilitasi dengan implementasi tentang intervensinya (Holter and Schwartz-Barcott 1993). Aliran komunikasi dalam tipe penelitian ini adalah antara fasilitator dan kelompok, sehingga gagasan-gagasan dapat dikomunikasikan kepada kelompok (Grundy 1982).

Sebuah proyek yang dibimbing secara teknis oleh *action research* akan memiliki karakteristik bahwa proyek diprakarsai oleh orang tertentu atau kelompok orang yang karena pengalaman mereka atau kualifikasi mereka akan dipandang sebagai ekspert atau figur otoritas. *Technical action research* mempromosikan praktik yang lebih efisien dan efektif. Tipe ini adalah produk yang diarahkan tapi mempromosikan partisipasi pribadi oleh praktisi dalam proses pergerakan. "It fosters the disposition characteristic of the artisan within the participating practitioners" (Grundy 1987). Pendekatan terhadap *action research* ini menghasilkan akumulasi pengetahuan yang dapat diperkirakan. Dorongan utamanya adalah pada validasi dan penyempurnaan teori yang ada dan deduksi yang esensial (Holter et al 1993).

### 2. *Mutual Collaborative*

Dalam proyek tipe *action research* ini peneliti dan praktisi *dating* bersama untuk mengidentifikasi masalah potensial, penyebabnya dan kemungkinan intervensinya (Holter et al; 1993). Masalah diidentifikasi setelah terjadi dialog antara peneliti dan praktisi dan dicapai sebuah pemahaman bersama. "*Practicipation action research* meningkatkan praktik melalui

aplikasi kearifan pribadi dari partisipan (Grundy 1982). Aliran komunikasi dalam tipe *action research* ini tidak boleh merusak hubungan antara masing-masing anggota kelompok dan fasilitator (Grundy 1982).

### 3. **Enhancement Approach**

Emancipation action research adalah "mempromosikan praksis emansipasi dalam partisipasi praktisi; yakni mempromosikan sebuah kesadaran kritis yang diperlihatkan dalam politik maupun aksis praktik dalam mempromosikan perubahan." (Grundy; 1987). Ada dua tujuan bagi peneliti menggunakan pendekatan ini, satunya adalah untuk meningkatkan kedekatan antara masalah actual dengan yang ditemukan oleh praktisi dalam setting spesifik dan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah. Tujuan kedua adalah untuk membimbing praktisi dalam mengidentifikasi dan membuat masalah fundamental menjadi eksplisi dengan meningkatkan kesadaran kolektif (Holter et al 1993).

Jurgen Habermas, seorang kritikus teori sosial menyajikan suatu model teoritis bagi pemahaman *emancipatory action research*. Habermas (1972) sebagaimana disitasi dalam Grundy (1982) menyajikan sebuah *framework* didalam mana kritik sosial mungkin dapat dikembangkan. "Hanya melalui pengembangan kritik, maka mediasi antara teori dan praktik memungkinkan terjadi. Pengembangan *action-oriented critique* memiliki tiga phrases: *theory*, *enlightenment*, *action*" (Grundy; 1982). *Emancipated strategies action* berasal dari disposisi kritik yang intensif (Grundy, 1982). *Critical intent* adalah disposisi yang memotivasi aksi dan interaksi pada semua tahap *emancipatory action research* dan secara khusus penting dalam pengembangan perspektif teori yang menginformasikan dan memperkuat sebuah proyek (Grundy 1982).



### C. Prinsip-Prinsip *Participation Action Research*.

Terdapat sejumlah prinsip yang memandu pelaksanaan PAR (*Participation action Research*).

**Pertama**, prinsip **Partisipasi**. Prinsip ini mengharuskan PAR (*Participation action Research*) dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota komunitas yang berkepentingan dengan perubahan situasi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, PAR (*Participation action Research*) dilakukan bersama di antara anggota komunitas melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk memperjelas kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatarbelakangi anggota komunitas saat terlibat dalam PAR (*Participation action Research*), termasuk penghargaan pada kesetaraan gender (terlebih jika dalam suatu komunitas, perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi).

Berbeda dengan riset konvensional, tim peneliti/praktisi PAR (*Participation action Research*) bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara anggota komunitas, bukan orang yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.

**Kedua**, prinsip **Orientasi Aksi**. Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR (*Participation action Research*) harus mengarahkan anggota komunitas untuk melakukan aksi-aksi transformatif mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR (*Participation action Research*) harus memuat agenda aksi yang jelas, terjadwal, dan konkret.

**Ketiga**, prinsip **Triangulasi**. PAR (*Participation action Research*) harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama anggota komunitas terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang lintas kelompok warga/elemen masyarakat (*crosscheck*). Prinsip ini menuntut PAR (*Participation action Research*) mengandalkan data-



data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama anggota komunitas di lapangan. Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan, statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembandingan.

**Keempat, prinsip Luwes atau Fleksibel.** Meskipun PAR (*Participation action Research*) dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, peneliti bersama anggota komunitas harus tetap bersikap luwes menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut. Bukan situasinya yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

#### **D. Instrumen Kerja *Participation Action Research*.**

Secara umum, metode PAR (*Participation action Research*) terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan Tematik. PAR (*Participation action Research*) Eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan solusinya, kemudian merencanakan aksi transformatif. Sedangkan PAR (*Participation action Research*) Tematik menganalisis program yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (*monitoring*).

Memanfaatkan kekayaan riset-riset konvensional yang masih terus berkembang, PAR melengkapi diri dengan banyak metode dan alat kerja. Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, PAR (*Participation action Research*) memiliki metode pemetaan lokasi melalui kegiatan kunjungan lapangan (*transect*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*).

Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan (*mind mapping*), menggambar diagram pohon masalah (*problem tree*), menulis peringkat kualitas (*ranking*), menggambar diagram keterkaitan (*linkage diagram*), hingga bermain



peran (*role play*) kemudian mendialogkan peran masing-masing dalam konteks situasi yang dimaksud.

Dalam dinamika tersebut, anggota komunitas sebagai partisipan PAR (*Participation action Research*) berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang memudahkan pengamatan (*visual*) dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin anggota komunitas berpartisipasi lebih aktif karena menggunakan kegiatan dan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan partisipan/informan.

### **E. Rancangan Penelitian PAR**

PAR (*Participation action Research*) secara teoritis menggambarkan semua metoda penelitian ilmu sosial yang pernah ada. Karena PAR (*Participation action Research*) memiliki premis prinsip-prinsip bahwa orang dengan sebuah masalah melakukan investigasi mereka sendiri, sehingga mengesampingkan teknik-teknik yang membutuhkan pemisahan antara penelitian dengan yang diteliti, seperti ketika *experimental* "subjects" dikesampingkan sebagai kegunaan penelitian. Metoda PAR berada di balik teknik dan sumber material dari orang yang terlibat. *Field observation*, penelitian pustaka dan arsip, investigasi sejarah menggunakan dokumen dan sejarah pribadi, *narratives and story telling*, maupun *questionnaires* dan wawancara, semuanya digunakan dalam PAR (*Participation action Research*).

Sekali pertanyaan penelitian diformulasikan, peneliti menyajikan opsi-opsi metodologis bagi kelompok dengan mempertimbangkan orang-orang yang ada dan sumber material dari komunitas, dan menjelaskan logika mereka, efikasi, dan batasan. Aspek PAR ini mengekspose metodologi penelitian dan menempatkannya pada tangan orang per orang sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai sebuah alat pemberdayaan. Tujuan dari PAR (*Participation action Research*) adalah agar peneliti



menggerakkan proses dengan berbagi pengetahuan dan ketrampilan warga kelompok.

Komunikasi adalah sebuah metodologi kunci dalam PAR (*Participation action Research*). Ia menggambarkan kombinasi komunikasi secara kreatif seperti tulisan, lisan, dan visual dalam rancangan, implementasi dan dokumentasi penelitian. Pekerja sosial masyarakat misalnya, kalangan perempuan pedesaan, dan kesadaran meningkatkan kelompok menggunakan foto dokumentasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari (*photo novella*) untuk mencatat dan merefleksikan kebutuhan mereka, mempromosikan dialog, mendorong aksi, dan menginformasikan kebijakan. Peneliti menggunakan teater dan imajinasi visual untuk memfasilitasi *collective learning, expression, action*. Bentuk lain dari komunikasi populer digunakan bersama-sama dalam menulis lagu, membuat kartun, pertemuan komunitas, *community self-portraits* dan rekaman *videotape*.

Pengembangan pengetahuan secara kritis mengundang pencampuran kreatif dari metoda tradisional melalui pertanyaan dan pendekatan. Penggunaan metoda komunikasi alternatif dalam PAR (*Participation action Research*) mendorong peneliti untuk menguji kembali metoda konvensional dan membuka kemungkinan menggunakan metoda-metoda yang selama ini tidak pernah mendapatkan legitimasi secara ilmiah.

#### **F. Menyusun Proses Penelitian.**

PAR (*Participation action Research*) dekat sekali dengan proses alamiah dari gerakan sosial. Sebagai kelompok yang baru memulai untuk mengakui, selalu saja ada kebutuhan untuk lebih memahami tentang situasi dimana orang menghadapinya bersama. PAR (*Participation action Research*) memulai dengan isu-isu yang muncul dari masalah sehari-hari dalam kehidupan. Pandangan ini terbentuk dalam epistemologi bahwa struktur pengalaman hidup adalah pemahaman seseorang terhadap kehidupan. Hal ini merupakan masalah yang mungkin tidak selalu disajikan sebagai sebuah sasaran perjuangan. Untuk itu, peneliti harus berkolaborasi dengan komunitas untuk membantu mengembalikan perasaan



mereka tetapi tidak mengartikulasikan masalah ke dalam sebuah topik yang tidak tertentu dari investigasi kolektif.

Peneliti perlu mengambil tanggung jawab bagi pengembangan suatu pandangan dalam realitas sehari-hari di sekitar isu penelitian sebelum memulai proyek penelitian. Mereka perlu mengetahui tentang muatan substansi spesifik dari sebuah topik penelitian, tentang budaya dan pengalaman hidup mereka yang kehidupannya akan menjadi fokus penelitian. Peneliti perlu menyadari bagaimana anggota sebuah kelompok memahami dan membicarakan tentang kehidupan mereka. Ini artinya mereka harus belajar segala sesuatu yang dapat ditemukan tentang komunitas dan sejarahnya secara historis dan sosiologis melalui catatan, wawancara, observasi, partisipasi dalam kehidupan komunitas. Dalam situasi ideal, peneliti sudah tinggal dalam komunitas dan berpartisipasi dalam kehidupan mereka (Brown, 1985). Peneliti tidak perlu menjadi anggota komunitas, tetapi ia harus memiliki komitmen untuk menjadi partisipan dan diterima oleh komunitas.

Pada fase ini peneliti menjelaskan kegunaan dan mulai mengidentifikasi dan menanyakan untuk membantu individu-individu kunci yang akan memainkan peran aktif dalam eksekusi sebuah proyek penelitian. Dalam proses ini, peneliti bertindak sebagai seorang *discussion organizer* dan fasilitator serta sebagai seorang narasumber teknis (Park, 1993). Bersama dengan sebuah organisasi kolaborasi, seperti LSM, pusat pelayanan sosial, atau Posyandu, peneliti melakukan kontak dengan anggota komunitas, mengaktifkan kepetingan mereka dalam masalah agar terlibat dengan *action-driven research*, dan membantu mengorganisasi pertemuan komunitas dimana isu-isu penelitian yang relevan akan didiskusikan. Pada fase ini, organisasi formal dari proyek penelitian dapat memakan waktu dan upaya. Situasi ini memerlukan ketrampilan interpersonal dan politik dari peneliti sebagai organizer.

Fase *pre-data gathering* dari PAR (*Participation action Research*) sebenarnya analog dengan *traditional field research*, dimana peneliti membentuk laporan dengan komunitas untuk ko-operasi dalam proses penelitian. Dalam PAR (*Participation action Research*), anggota komunitas menempatkan diri sebagai pemeran aktif bersama dengan



peneliti, bukan sebagai *passive providers* dari informasi. Sekali anggota komunitas memulai berdiskusi bersama tentang masalah kolektif mereka, peneliti berpartisipasi dalam pertemuan itu untuk membantu menformulasikan masalah melalui cara-cara yang kondusif bagi investigasi, menggunakan pengetahuan komunitas yang ia kembangkan sebelumnya. Dari sini, peneliti bertindak sebagai *organizer*, fungsi ini kemudian dilakukan oleh warga komunitas dengan ketrampilan organisasi dan sumber. Tujuan PAR (*Participation action Research*) adalah untuk menyediakan *catalyst* untuk membawa pemimpin potensial dalam komunitas tampil ke depan. Di sini, peneliti berbagi *expertise* mereka dengan warga komunitas, mengakui bahwa komunitas terlibat langsung dalam dan memiliki suara kritis dalam menentukan arah dan tujuan perubahan.

#### **G. Langkah-langkah Riset Aksi**

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode PAR adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan Awal (*Preleminary mapping*)

Pemetaan awal merupakan pemetaan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui situasi dan keadaan sosial yang ada di masyarakat. Pemetaan ini dilakukan bersama dengan masyarakat. Dengan pemetaan ini peneliti dapat mengetahui letak geografis Dusun Sempol dan batas-batas Dusun Sempol. Selain itu jumlah penduduk, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan perekonomian masyarakat dapat di dapat dari kegiatan pemetaan awal.

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Dalam melakukan penelitian pendampingan ini peneliti juga perlu membangun hubungan kemanusiaan dengan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peneliti. Dalam membangun hubungan kemanusiaan ini peneliti berbaur dengan masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat, yaitu tahlilan, sholat berjama'ah dll.



Langkah-langkah ini dilakukan supaya peneliti bisa menyatu menjadi simbiosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya bersama-sama (partisipatif).

3. **Penentuan Agenda Riset Untuk Perubahan Sosial**  
Penentuan agenda riset dalam penulisan ini di perlukan oleh peneliti. Bersama komunitas, peneliti mengagendakan program riset melalui teknik *Partisipatory Rural Aprasial* (PRA) untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan social. Sambil merintis membangun kelompok-kelompok komunitas, sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada.
4. **Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*)**  
Bersama Komunitas melakukan pemetaan wilayah, maupun persoalan yang dialami masyarakat. Pemetaan lebih difokuskan pada pemberdayaan kaum wanita di Desa Ragawacana.
5. **Menyusun Strategi Gerakan**  
Komunitas menyusun strategi gerakan untuk memecahkan problem kemanusiaan yang telah dirumuskan. Menentukan langkah sistematis, menentukan pihak yang terlibat(*stakeholders*), dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakannya serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program.
6. **Pengorganisasian Masyarakat**  
Komunitas didampingi peneliti membangun pranata-pranata sosial. Baik dalam bentuk kelompok-kelompok kerja, maupun lembaga-lembaga masyarakat yang secara nyata bergerak memecahkan problem sosialnya secara simultan. Demikian pula membentuk jaringan-jaringan antar kelompok kerja dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan program aksi yang direncanakan.
7. **Melancarkan Aksi Perubahan**  
Aksi memecahkan problem dilakukan secara simultan dan partisipatif. Program pemecahan persoalan kemanusiaan bukan sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri,

tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat, sehingga terbangun pranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan *community organizer* (pengorganisir dari masyarakat sendiri) dan akhirnya akan muncul *local leader* (pemimpin lokal) yang menjadi pelaku dan pemimpin perubahan.

#### 8. Refleksi (Teoritisasi Perubahan Sosial)

Peneliti bersama komunitas merumuskan teoritisasi perubahan sosial berdasarkan atas hasil riset, proses pembelajaran masyarakat, dan program-program aksi yang telah terlaksana, peneliti dan komunitas merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya (dari awal sampai akhir). Refleksi teoritis dirumuskan secara bersama, sehingga menjadi sebuah teori akademik yang dapat dipresentasikan pada khalayak publik sebagai pertanggung jawaban akademik.

#### 9. Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan

Keberhasilan program PAR tidak hanya diukur dari hasil kegiatan selama proses, tetapi juga diukur dari tingkat keberlanjutan program (*sustainability*) yang sudah berjalan dan munculnya pengorganisir-pengorganisir serta pemimpin lokal yang melanjutkan program untuk melakukan aksi perubahan. Oleh sebab itu, bersama komunitas peneliti memperluas skala gerakan dan kegiatan. Mereka membangun kelompok komunitas baru di wilayah-wilayah baru yang dimotori oleh kelompok dan pengorganisir yang sudah ada. Bahkan diharapkan komunitas-komunitas baru itu dibangun oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus difasilitasi oleh peneliti. Dengan demikian masyarakat akan bisa belajar sendiri, melakukan riset dan memecahkan problem sosialnya secara mandiri.

### H. Prinsip-Prinsip PAR

Terdapat 16 prinsip kerja PAR yang menjadi karakter utama dalam implementasi kerja PAR bersama komunitas. Adapun 16 prinsip kerja tersebut adalah terurai sebagai berikut:



1. Sebuah pendekatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial dan praktek-prakteknya dengan cara merubahnya dan melakukan refleksi dari akibat-akibat perubahan itu untuk melakukan aksi lebih lanjut secara berkesinambungan.
2. Secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (autentik) membentuk sebuah siklus (lingkaran) yang berkesinambungan dimulai dari: analisa sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi (teoritisasi pengalaman) dan kemudian analisa social, kembali begitu seterusnya mengikuti proses siklus lagi. Proses dapat dimulai dengan cara yang berbeda.
3. Kerjasama untuk melakukan perubahan: melibatkan semua pihak yang memiliki tanggungjawab (stakeholders) atas perubahan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dan secara terus menerus memperluas dan memperbanyak kelompok kerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam persoalan yang digarap.
4. Melakukan upaya penyadaran terhadap komunitas tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami melalui melibatkan mereka dalam berpartisipasi dan bekerjasama pada semua proses research, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi.
5. Suatu proses untuk membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis yaitu, upaya menciptakan pemahaman bersama terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat secara partisipatif menggunakan nalar yang cerdas dalam mendiskusikan tindakan mereka dalam upaya untuk melakukan perubahan sosial yang cukup signifikan.
6. Merupakan proses yang melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoritisasi kehidupan sosial mereka. Dalam hal ini masyarakat dipandang lebih tahu terhadap persoalan dan pengalaman yang mereka hadapi untuk itu pendapat-pendapat mereka harus dihargai dan solusi-solusi sedapat mungkin diambil dari mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

7. Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji. Apapun pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi tentang institusi-institusi sosial yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat harus siap sedia untuk dapat diuji dan dibuktikan keakuratan dan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diperoleh di dalam masyarakat itu sendiri.
8. Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara cermat. Semua yang terjadi dalam proses analisa sosial, harus direkam dengan berbagai alat rekam yang ada atau yang tersedia untuk kemudian hasil-hasil rekaman itu dikelola dan diramu sedemikian rupa sehingga mampu mendapatkan data tentang pendapat, penilaian, tanggapan, reaksi dan kesan individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi secara akurat, untuk selanjutnya analisa kritis yang cermat dapat dilakukan terhadapnya.
9. Semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai objek riset. Semua individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat didorong untuk mengembangkan dan meningkatkan praktek-praktek sosial mereka sendiri berdasarkan pengalaman pengalamannya sebelumnya, yang telah dikaji secara kritis.
10. Merupakan proses politik dalam arti luas. Diakui bahwa riset aksi ditujukan terutama untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Karena itu mau tidak mau hal ini akan mengancam eksistensi individu maupun kelompok masyarakat yang saat itu sedang memperoleh kenikmatan alam situasi yang membelenggu, menindas, dan penuh dominasi. Agen perubahan sosial harus mampu menghadapi dan meyakinkan mereka secara bijak, bahwa perubahan sosial yang akan diupayakan bersama adalah demi kepentingan mereka sendiri di masa yang akan datang.
11. Mensyaratkan adanya analisa relasi sosial secara kritis. Melibatkan dan memperbanyak kelompok kerjasama secara partisipatif dalam mengurai dan mengungkap pengalaman-



- pengalaman mereka dalam berkomunikasi, membuat keputusan dan menemukan solusi, dalam upaya menciptakan kesefahaman yang lebih baik, lebih adil dan lebih rasional terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga relasi sosial yang ada dapat dirubah menjadi relasi sosial yang lebih adil, tanpa dominasi dan tanpa belenggu.
12. Memulai isu kecil dan mengaitkan dengan relasi-relasi yang lebih luas. Penelitian sosial berbasis PAR harus memulai penyelidikannya terhadap suatu persoalan yang kecil untuk melakukan perubahan terhadapnya, selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap persoalan berskala yang lebih besar dengan melakukan perubahan yang lebih besar pula dan seterusnya.
  13. Memulai dengan siklus proses yang kecil. (analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi dst.). melalui kajian yang cermat dan akurat terhadap suatu persoalan berangkat dari hal yang terkecil akan diperoleh hasil-hasil yang merupakan pedoman untuk melangkah selanjutnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar.
  14. Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain. Dalam melakukan proses PAR peneliti harus memperhatikan dan melibatkan kelompok kecil di masyarakat sebagai partner yang ikut berpartisipasi dalam semua proses penelitian meliputi analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi dan refleksi dalam rangka melakukan perubahan social. Selanjutnya partisipasi terus diperluas dan diperbanyak melalui pelibatan dan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar untuk mengkritisi terhadap proses-proses yang sedang berlangsung.
  15. Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman proses. PAR menjunjung tinggi keakuratan fakta-fakta, data-data dan keterangan-keterangan langsung dari individu maupun kelompok masyarakat mengenai situasi dan

kondisi pengalaman-pengalaman mereka sendiri, karena itu semua bukti-bukti tersebut seharusnya direkam dan dicatat mulai awal sampai akhir oleh semua yang terlibat dalam proses perubahan sosial untuk mengetahui proses perkembangan dan perubahan social yang sedang berlangsung, dan selanjutnya melakukan refleksi terhadapnya sebagai landasan untuk melakukan perubahan sosial selanjutnya.

16. Mensyaratkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka. PAR adalah suatu pendekatan dan penelitian yang mendasarkan dirinya pada fakta-fakta yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Untuk itu proses pengumpulan data harus dilakukan secara cermat untuk selanjutnya proses refleksi kritis dilakukan terhadapnya, dalam upaya menguji seberapa jauh proses pengumpulan data tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar buku dalam penelitian sosial.

### **I. Tehnik Pendampingan**

Dalam penggalan data penulisan skripsi ini menggunakan metode pendampingan yang berbasis Participatory Action Research (PAR) yaitu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik.

Adapun langkah-langkah dalam PAR, yaitu:

1. **Penyiapan Sosial** (Merancang Komunikasi Kemanusiaan)

Dalam penyiapan sosial ini berarti mengetahui dan memahami masyarakat. Dalam proses ini pendamping berbaur dengan masyarakat untuk mengenali dan memahami masyarakat. Dengan melalui inkulturasi yang di bangun maka akan menciptakan komunikasi dengan masyarakat. Karena Peneliti berfikir bahwa jika komunikasi yang di bangun dengan



masyarakat kuat maka akan lebih mudah untuk membangun partisipasi masyarakat dalam membantu peneliti. Penyiapan social dilakukan dengan cara memahami kelompok yang tidak terorganisir dalam masyarakat, memahami peran dan fungsi lembaga yang ada di masyarakat dan mengenali tradisi yang dilakukan masyarakat.

## 2. *Community Riset Social Problem Diagnostic*

Yaitu menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami keseharian masyarakat maka pendamping dapat mengidentifikasi masalah. Selain itu pendamping juga melakukan FGD bersama masyarakat untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada. Pohon masalah pun juga dibuat bersama masyarakat.

Selain itu yang dilakukan pendamping dalam menganalisis masalah yaitu dengan mapping, transek, memahami alur sejarah dan tradisi masyarakat. Diagram alur, diagram ven dan analisis social juga digunakan dalam memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

## 3. *Planning*

Istilah pengorganisasian rakyat (*people organizing*) atau yang lebih juga dikenal dengan istilah pengorganisir masyarakat (*community organizing*) sebenarnya adalah suatu peristilahan yang sudah menjelaskan dirinya sendiri. Istilah ini memang mengandung pengertian yang luas dari dua akar katanya. Istilah rakyat disini tidak hanya berarti satu perkauman (*community*) yang khas, dalam konteks yang lebih luas juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya. Istilah pengorganisasian disini lebih diartikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat. Sehingga bisa juga diartikan suatu cara pendekatan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah tersebut.

Planning adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dilakukan bersama masyarakat. Dari pohon masalah yang dibuat bersama masyarakat maka muncul pohon harapan yang berisikan harapan-harapan masyarakat dalam memecahkan

masalah tersebut. Pendamping bersama masyarakat merencanakan program yang akan di laksanakan. Dengan membuat proposal dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Pendamping bersama masyarakat mengadakan pertemuan-pertemuan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### 4. *Political Action*

Yaitu membentuk kelompok-kelompok social baru. Hal ini dilakukan untuk pemecahan masalah. Dengan membangun leadership atau seorang pemimpin yang dapat mengorganisir masyarakat dan dapat melakukan analisis terarah sehingga mendorong proses transparansi atas semua pihak dan semua permasalahan. Kegiatan ini dilakukan bersama partisipasi masyarakat. Aksi yang di lakukan ini menjawab harapan-harapan masyarakat.

Dalam membangun membangun partisipasi masyarakat sebelum melakukan aksi tidak bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi atas nama, partisipasi pasif, partisipasi lewat konsultasi maupun partisipasi fungsional. Melainkan partisipasi yang dibangun adalah partisipasi interaktif, dimana ide dalam berbagai kegiatan mulai perencanaan dan evaluasi melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengambil inisiatif sendiri , melaksanakan kegiatan secara mandiri dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri.

#### 5. *Reflection*

Yaitu tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua komponen aktifitas terhadap perubahan sosial yang menjadi visi masyarakat. Pendamping merefleksikan dan menganalisis dari hasil kegiatan yang telah di lakukan.

Pada dasarnya PAR (*Participation action Research*) yang banyak dipopulerkan oleh pemikiran-pemikiran kritis seperti halnya Paulo Freire, Antonio Gramsci dan para pemikir kritis mazhab kritis



Frankfurt adalah upaya keluar dari kebuntuan mainstream analisis sosial dan riset yang mekanis dan positivistik. Prinsip pokok yang ingin diangkat dalam riset ini adalah meletakkan keterlibatan subjek masyarakat sebagai bagian penting dalam analisis sosial. Orientasi riset diarahkan untuk melakukan usulan-usulan perubahan dalam nilai proses yang dialektikal yakni dikembangkan dalam spirit "participation - action - research".

Dalam proses riset ini tidak ada kesimpulan akhir, karena menyadari bahwa kondisi objektif masyarakat akan selalu berkembang, berubah dan berdinamika dengan seluruh keterkaitan perubahan-perubahan kondisi objektif yang ada. Menjadi jelas bahwa PAR (*Participation action Research*) memang tidak diorientasikan untuk melakukan kesimpulan atas hipotesa kita tentang masyarakat, melainkan menjadi "alat dan senjata analisis" untuk mendorong berbagai perubahan sosial. Ada tiga pilar penting untuk membaca secara utuh dimensi riset aksi ini, yakni : metodologi riset, dimensi aksi dan dimensi partisipatoris. Tiga pilar itu lebih jelasnya akan mengatakan bahwa PAR(*Participation action Research*) dikerjakan dengan memacu pada paradigma dan metodologi riset tertentu, harus diorientasikan untuk melakukan aksi perubahan dan transformasi sosial, dan dalam praktiknya riset ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses riset sosial.

PAR (*Participation action Research*) secara sadar mengakui bahwa riset ini mempunyai kerangka dasar perspektif yang lebih kritis dibandingkan dengan pola-pola riset "konvensional" yang masih menjadi mainstream penelitian saat ini. Paradigma kritis tentu saja mendorong lahirnya sebuah riset sebagai cara membangun emansipasi. Riset ini secara sadar mengakui adanya usaha wajib untuk keterlibatan penuh antara subjek peneliti dan subjek komunitas (rakyat). Persentuhan dan keterlibatan peneliti dalam masyarakat bukan hanya dalam hal kedekatan jarak secara fisik melainkan subjek peneliti menjadi bagian utuh dari proses hidup komunitas. Riset Aksi Partisipatoris dilaksanakan secara partisipatoris di antara masyarakat dalam sebuah komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi



transformatif. Konsep transformasi yang ditawarkan minimal membawa pesan :

- pertama, membawa orang-orang yang terisolasi kedalam masalah dan kebutuhan bersama;
- kedua, melakukan berbagai dialog dan validasi pengalaman untuk proses pemahaman dan refleksi kritis;
- ketiga, menyajikan pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai informasi tambahan bagi upaya refleksi secara kritis;
- keempat, mengkontekstualisasikan apa yang selama ini dirasakan setiap pribadi;
- kelima, menghubungkan pengalaman pribadi dengan kenyataan-kenyataan sosial di sekitarnya.

PAR (*Participation action Research*) sangat menolak peran intelektual yang berdiri sebagai "*arsitektur sosial*" yang berjarak dengan komunitas. Asumsinya adalah bahwa riset bukan hanya sekedar ditempatkan sebagai alat untuk memahami ketidakadilan dalam masyarakat melainkan berupaya membantu rakyat menuju upaya "*emansipasi*". Riset ini sekaligus mempunyai keterikatan moral untuk menjadi "*kritik*" terhadap status quo dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih adil. Riset ini sangat menghindari sikap-sikap dan praktik-praktik yang menisahkan penelitian dalam keterkaitan subjek dan objek penelitian. Peneliti dan partisipan adalah aktor bersama dalam proses investigasi, saling mempengaruhi, menginterpretasikan berbagai kejadian praktik masyarakat, berbagi pengalaman atas pilihan aksi.

Sikap dasar riset ini selalu meletakkan dan menitikberatkan pada "*kualitas proses*" daripada "*hasil*" sehingga mendorong kecenderungan analisis sosial tidak harus didesain secara baku sebelumnya. Kesahihan sebuah analisis dan riset sosial tidak ditentukan oleh sejauh mana prosedur riset itu "*objektif*" atau tidak melainkan ditentukan oleh sejauh mana proses" dialektis bersama rakyat dilakukan dalam integrasi intersubjektif peneliti dan rakyat. Riset Aksi Partisipatoris tidaklah dilakukan dalam ruang laboratorium melainkan dalam latar alamiah bersama masyarakat. Kulaitas riset dan analisis berjalan tanpa melalui rekayasa buatan yang sudah didesain sebelumnya.



Sebagai pilihan etisnya sesuai dengan kerangka "axiologis" yang dibawa oleh "paradigma kritis", rumusan-rumusan masalah selalu dilahirkan oleh subjek peneliti bersama masyarakat. Pendekatan kritis selalu menekankan peran penting "dialog" menyeluruh di antara subjek peneliti dan masyarakat. Hubungan yang terbangun tidaklah dalam peran deterministik "subjek - objek" melainkan "subjek - subjek". PAR (*Participation action Research*) lebih banyak juga dikenal sebagai "tindakan riset". Pendekatan ini banyak diorientasikan untuk "membongkar budaya bisu" masyarakat yang sudah sekian lama terbelenggu budaya-budaya yang dominan. Budaya-budaya dominan banyak ditunjukkan dalam budaya-budaya teknokratis dan mekanistik yang banyak menjadi ciri menonjol masyarakat modern. Proses riset sekaligus sebagai "proyek pemberdayaan aktif". Riset Aksi ini sekaligus berperan penting untuk membongkar pengetahuan yang melegitimasi praktik pembangunan yang berjalan timpang sambil melakukan proses transformasi sosial. Hasil yang diharapkan tentu saja adalah adanya tindakan kritis untuk mendorong perubahan sosial dan memperkuat masyarakat yang hidup dalam ketimpangan.

Riset ini lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif teoritis "fenomenologis kritis" yang lebih memandang masyarakat sebagai entitas yang kedudukannya sangat khas, subjektif dan kontekstual secara ruang dan waktu, sehingga peneliti perlu memahaminya dengan cara lebih kritis segala fenomena masyarakat dalam konteksnya yang khas. Ada situasi yang merajut dalam matarantai masyarakat yang serba kompleks. Proses perjalanan masyarakat tidak hanya bisa dipandang sebagai proses yang alamiah. Masyarakat hidup dalam ketegangan-ketegangan dan relasi dialektik di setiap unsur. Dalam banyak hal situasi di hadapan kita tidaklah berjalan lancar tetapi penuh relasi keterkaitan kepentingan yang saling mempengaruhi.

PAR (*Participation action Research*) dalam tahapan dan langkah awalnya dimulai dengan mengidentifikasikan masalah-masalah sosial nyata dan kongkrit yang dihadapi masyarakat bersama subjek peneliti. Dari investigasi dan penemuan masalah tersebut, pada akhirnya ada upaya menemukan pemecahan-pemecahan masalah



yang keluar sepenuhnya dari masyarakat melalui program-program aksi kongkrit. Karena arah dasarnya sebagai upaya mendorong pembebasan terhadap struktur-struktur sosial yang tidak adil yang menindas, maka riset aksi partisipatoris cenderung dan sering dilihat sebagai riset dengan "*pendekatan politis*". Riset aksi ini selalu melakukan apa yang disebut sebagai "*kritik ideologi*" yang mampu untuk melihat mana struktur sosial yang adil dan mana yang tidak. Metode aksi partisipatoris secara sederhana bisa digambarkan melalui fase tahapan yakni : interpretasi, analitis empiris, dialog kritis dan dilanjutkan dengan aksi.

Identifikasi persoalan awal dengan melakukan pemetaan potensi kelompok progresif adalah dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan bahwa hanya dengan bisa membangun potensi tersebut maka "*PAR (Participation action Research)*" akan sejak awal mampu mempersiapkan tujuan akhir dari sebuah riset kritis yakni pemberdayaan yang berorientasi pada aksi perubahan.

Mempelajari kondisi struktur sosial yang menghambat aksi memberi pengertian bahwa sebuah riset aksi berusaha untuk mampu membongkar "*kesadaran kemapanan*" dan jerat-jerat ideologi dominan. Tugas *PAR (Participation action Research)* adalah menentang sebuah bentuk rpresi cara berpikir dan mampu bertindak secara manusiawi baik secara individu maupun kelompok karena kepentingan dasar riset ini adalah "*keperpihakan*". Mekanisme tahapan *PAR (Participation action Research)* dengan tahapan "aksi – partisipasi – riset" tentunya menjadi alur tahapan yang tidak sederhana. Artinya untuk bisa memahami problem mendasar dari sebuah riset aksi, berarti subjek peneliti juga harus mampu membongkar problem-problem riil yang ada dihadapi oleh masyarakat.



## BAB V

### IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN

#### A. Kondisi Objektif Tempat Pengabdian Desa Ragawacana

Desa Ragawacana adalah salah satu desa di kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan yang mempunyai luas 176.589 Ha. Jumlah penduduk desa Ragawacana 3.246 jiwa yang terdiri dari 1.683 laki-laki dan 1.585 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 891 KK sedangkan jumlah keluarga miskin (gaskin) 274 KK dengan presentasi 10% dari jumlah keluarga yang ada.

**Gambar 4.1. Peta Desa Ragawacana Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan**



Berdasarkan topografi dan kantor Tanah Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan secara umum berupa Sawah dan darat yang berada pada ketinggian antara 0 M s/d 500 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 17 s/d 26 celcius Desa Ragawacana terdiri dari 4 dusun 4 Rw 17 Rt. Orbitkan dan waktu temuh dari ibukota kecamatan 3 Km<sup>2</sup> dengan waktu tempuh 10 menit dan dari ibukota kabupaten 7 km<sup>2</sup> dengan waktu tempuh 15 menit.

## B. Profil Desa

Luas wilayah Desa Ragawacana	: 176,589	Ha
a. Tanah Sawah	: 71,509	Ha
b. Pemukiman	: 23,931	Ha
c. Perkantoran/Pasilitas Umum	: 0,230	Ha
d. Lainnya	: 25.853	Ha
Penduduk	: 3.268	Jiwa
a. Laki-laki	: 1.683	Jiwa
b. Perempuan	: 1.583	Jiwa

Gambar 4.2. Kantor Kepala Desa Ragawacana



Kepala Keluarga	: 891	KK
a. Kepala Keluarga Laki-laki	: 725	KK
b. Kepala Keluarga Perempuan	: 166	KK
Jumlah Rumah	: 526	Rumah
a. Rumah Permanen I	: 520	Rumah
b. Rumah Permanen II	: -	
Rumah		
c. Rumah Semi Permanen	: 2	Rumah
d. Rumah Biasa/Bilik	: 4	Rumah
Sarana Pendidikan		
a. Kelompok PAUD	: 1	
Kelompok		
b. Taman Kanak-Kanak	: -	
Kelompok		



c. TPA	:	-
Kelompok	:	2 Buah
d. SD	:	- Buah
e. MD	:	-
Sarana Kesehatan Masyarakat	:	891 KK
a. Jamban Keluarga	:	887 KK
b. KK Mempunyai Jamban	:	4 KK
c. KK Tdk Mempunyai Jamban	:	49,784 Ha
Tanah Darat	:	71,509 Ha
Tanah Sawah	:	
Dengan Batas-batas Desa sebagai berikut :		
a. Sebelah Barat	: Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya	
b. Sebelah Timur	: Desa Cibentang Kecamatan Kramatmulya	
c. Sebelah Selatan	: Desa Gunung Keling Kecamatan Cigugur	
d. Sebelah Utara	: Desa Gandasoli Kecamatan Kramatmulya	

## J. Sejarah Desa Ragawacana

Kira-kira pada tahun 1500 M. Desa Ragawacana berasal nama Bale Are dan waktu itu belum tersusun pemerintahan dan rakyatnya masih memeluk agama Hindu. Pada suatu hari di bulan Maulid telah lewat rombongan Gedeng Cigugur yang maksudnya serba ke Cirebon yaitu akan mengikuti seba para Wali dan rombongan gedung Cigugur dengan kendaraan kereta berkuda. Syahdan disuatu kampung yang disebut Bale Are kereta kuda yang ditunggangi Gedeng Cigugur tersebut kudanya rarad dan jatuhlah Gedung Cigugur dari keretanya sampai meninggal dunia, dan dimakamkan di Kampung Bale Are.

Salah seorang pengawalnya melanjutkan perjalanannya ke Cirebon untuk menyampaikan berita duka cita atas kecelakaan Gedeng Cigugur disuatu kampung yang disebut Bale Are menjadi Desa Ragawacana karena Gedeng Cigugur jasadnya dipendam di Bale Are sedang beritanya sampai ditempat siding jadi dengan arti **RAGA** yaitu **Badan WACANA** yaitu **Ceritadan** pada tahun kurang lebih 1500 M. Telah datang misi Islam dari Cirebon ke Kampung

Ragawacana dari keturunan Gedeng kanggrasan yang disebut Gedeng Ragawacana dan mengatur pemerintahan disana dan dibentuklah lingkungan yang meliputi Ragawacana, Pajambon, Gandasoli, Cibentang dan Gunung Keeling dibawah Pemerintahan Gedeng Ragawacana dengan nama Desa Ragawacana, Geeng Ragawacana mempunyai anak 7 Orang yaitu

1. Raden Mustapa
2. Tuang Tengah
3. Tuan Sadamaya
4. Niti Putih
5. Niti Sara
6. Wana Kuru
7. Gedeng Panarangan

Dan Pemerintah Desa Ragawacana sejak tahun 1500 M, sampai kurang lebih 1700 M Dipegang oleh keturunan Gedeng Ragawacana dan melanjutkannya dirobah menjadi kademangan dengan pimpinan pemerintahan bernama Demang sampai kurang lebih 1800 M dari tahun 1800 M sampai sekarang pemerintah dipegang oleh kuwu sebagai kepala pemerintahan dengan istilah para kuwu sebagai berikut :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Kuwu Sukimin           | 1800 – 1840 |
| 2. Kuwu Rundeng           | 1840 – 1858 |
| 3. Kuwu Yuda Diwangsa     | 1858 – 1861 |
| 4. Kuwu Anggadikarana     | 1861-1862   |
| 5. Kuwu Natakrama         | 1862 – 1881 |
| 6. Kuwu Selat Jayasasmita | 1881-1917   |
| 7. Kuwu Sastra Santana    | 1917 – 1919 |
| 8. Kuwu Jaya Sasmita      | 1919 – 1920 |
| 9. Kuwu Sastra Santana    | 1920 – 1923 |
| 10. Kuwu Prawira Sasmita  | 1923 – 1928 |
| 11. Kuwu Singa Wilastra   | 1928        |
| 12. Kuwu Amir             | 1928 – 1931 |
| 13. Kuwu Wiryasuminta     | 1931 – 1933 |
| 14. Kuwu Karna Sasmita    | 1933 – 1946 |
| 15. Kuwu Mad Saeh         | 1946 – 1948 |
| 16. Kuwu Wiryasuminta     | 1948 – 1949 |



17. Kuwu Sumarta Sidastra	1949 – 1967
18. Kuwu Wijaya Prawira	1967 – 1973
19. Kuwu M Rachmanudin	1973 – 1989
20. Kuwu Dedi Djuhana	1989 – 1998
21. Kuwu Uju Djuheni	1998 – 2007
22. Kuwu Sutini	2007 – 2013
23. Kuwu Sutini	2013 – 2019

Gambar 4.4. Tim Pengabdian Bersama dengan Kepala Desa Ragawacana

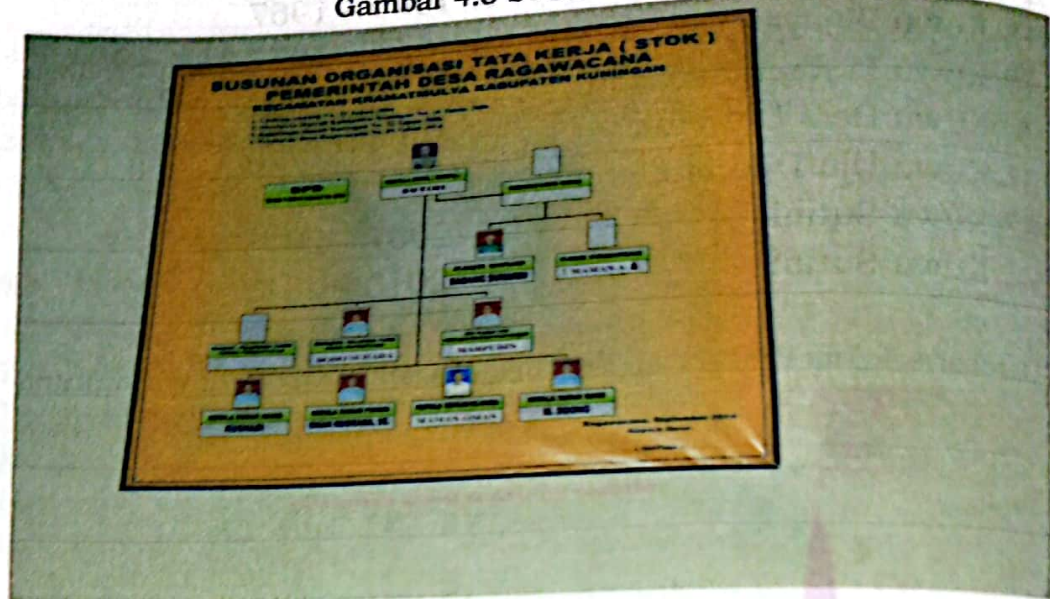


Itulah riwayat singkat Desa Ragawacana dan Kuwu yang pernah memerintah Desa Ragawacana, semoga akan dijadikan tambahan dalam catatan sejarah bagi kita semuanya khususnya masyarakat Desa Ragawawacana.

Susunan pemerintah tidak tercatat tahun dari awal, karena terbatas informasi yang bisa dihimpun, Susunan pemerintahan Desa Ragawacana yang tercatat adalah :

1. Laporan Kepala Dusun
2. Laporan Kaur Pemerintahan
3. Laporan Kaur Ekbang
4. Laporan Kaur Kesra
5. Laporan Kaur Umum

Gambar 4.5 STOK Desa Ragawacana



### K. Keadaan Sosial

Dilihat dari tingkat pendidikan Penduduk Desa Ragawacana terbagi atas :

- Tidak Tamat SD : 6 Orang
- Lulusan SD/ Sederajat : 504 Orang
- Lulusan SLTP/Sederajat : 447 Orang
- Lulusan SLTA/Sederajat : 737 Orang
- Lulusan D-1/Sederajat : - Orang
- Lulusan D-2/Sederajat : 2 Orang
- Lulusan D-3/Sederajat : - Orang
- Lulusan S-1 : 35 Orang
- Lulusan S-2 : 2 Orang
- Lulusan S-3 : - Orang

Sedangkan dari segi mata Pencaharian terdiri atas :

- Petani : 499 Orang
- Buruh : 217 Orang
- PNS : 17 Orang
- Pedagang : 2 Orang
- Karyawan Swasta : 25 Orang
- Wirausaha lainnya : 25 Orang



#### **L. Keadaan Ekonomi**

Bila dilihat dari kondisi ekonomi penduduk desa Ragawacana, maka terlihat bahwa masih cukup banyak terdapat warga yang berada dalam garis kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari data-data dibawah ini :

- a. KK Miskin : 210 KK
- b. Penduduk Usia Kerja : 328 Orang
- c. Pendapatan Masyarakat : Rp. 72.000/orang
- d. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pras Sejahtera ; 25 KK  
Sarana Perekonomian
- a. Jalan Desa : 800 M
- b. Jalan Lingkungan : 5000 M
- c. Tanah Sawah : 71,509 Ha
- d. Irigasi : 9.897 M
- e. Kelompok Tani/Gapoktan : 7 Kelompok
- f. Industri Kecil : - buah

#### **M. Kondisi Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa Ragawacana saat ini mempunyai perangkat Desa sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala Desa 1 Orang Kepala Desa, Kepala Urusan 4 Orang, Rurah 4 Orang.

Adapun lembaga desa lainnya, baik itu lembaga pemerintahan Desa maupun Lembaga kemasyarakatan antara lain :

- ❖ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 10 Orang
- ❖ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa : 10 Orang
- ❖ PKK : 31 Orang
- ❖ Karangtaruna : 15 Orang
- ❖ GAPOKTAN : 3 Orang
- ❖ Anggota Linmas : 6 Orang

Disamping itu ada aspek pemerintahan lainnya yang menjadi kewajiban Desa untuk melaksanakan Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2009 s/d 2014 target PBB yang menjadi Kewajiban Desa Ragawacana selalu 100%.

Gambar 4.6. Koperasi Desa Ragawacana



#### N. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa dari aspek Pemerintah terdiri dari :

- ❖ Jumlah Dusun : 4 Dusun
- ❖ Jumlah RW : 4 RW
- ❖ Jumlah RT : 17 RT

#### O. Struktur Organisasi

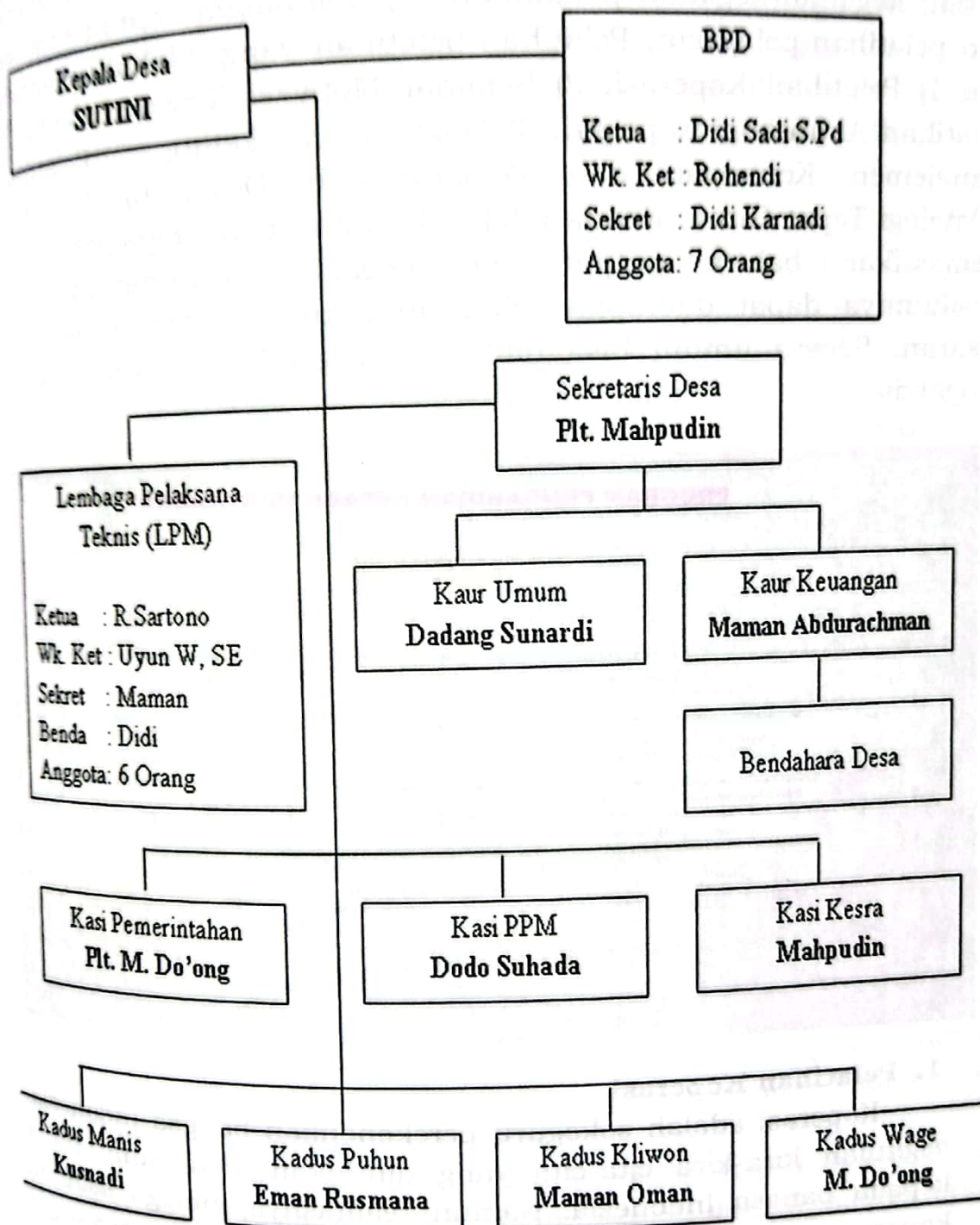
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan pada saat ini terdiri dari :

- ❖ Kepala Desa : Ada
- ❖ Ketua Badan Permusyawaratan Desa : Ada
- ❖ Sekretaris Desa : Tidak Ada
- ❖ Bidang Pemerintahan/Ngabihi : Ada
- ❖ Bidang Ekonomi Pembangunan/Raksabumi : Ada
- ❖ Bidang Kaur Umum : Ada
- ❖ Bidang Keuangan : Ada
- ❖ Bidang Agama dan Kesejahteraan/Ketib : Ada
- ❖ Kepala Dusun
  - Kadus Manis : Ada
  - Kadus Puhun : Ada
  - Kadus Kliwon : Ada
  - Kadus Wage : Ada



Untuk lebih jelas struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dapat dilihat dalam bagan berikut :

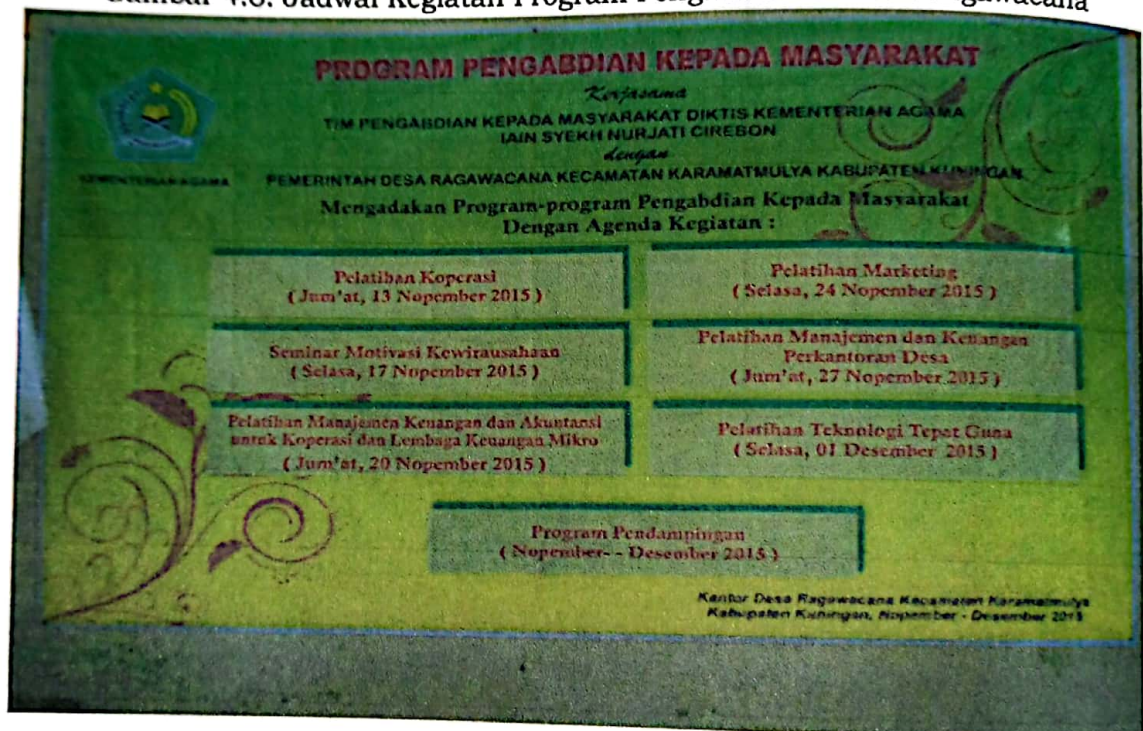
Gambar 4.7. SOTK Pemerintahan Desa Ragawacana



## P. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian di Desa Ragawacana dilaksanakan dari tanggal 13 November 2015 sampai 30 Desember 2015. Secara garis besar kegiatan pengabdian dibagi ke dalam dua kegiatan. Pertama adalah kegiatan-kegiatan penguatan *softskill* dalam bentuk seminar dan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan antara lain 1) Pelatihan Koperasi, 2) Seminar Motivasi Kewirausahaan, 3) Pelatihan Akuntansi Koperasi, 4) Pelatihan Marketing, 5) Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemerintahan Desa, 6) Pelatihan Teknologi Tepat Guna. Kedua adalah kegiatan pendampingan untuk memastikan bahwa output dari kegiatan pelatihan-pelatihan sebelumnya dapat diterapkan dan dipraktikkan oleh masyarakat sasaran. Secara umum bisa dilihat dari gambar jadwal kegiatan pengabdian.

Gambar 4.8. Jadwal Kegiatan Program Pengabdian di Desa Ragawacana



### 1. Pelatihan Koperasi

Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia, begitulah kira-kira cita-cita yang dititipkan oleh Bung Hatta kepada bangsa Indonesia. Namun realitasnya, hingga saat ini koperasi masih belum mampu menjadi tiang utama penyangga ekonomi bangsa, dan ironisnya eksistensi koperasi seperti "mati



enggan hidup mau". Secara konsep koperasi merupakan wujud ideal dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan bangsa Indonesia dalam membangun ekonomi pancasila. Letak permasalahan bukan pada tataran konsep, melainkan sumberdaya manusia, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya koperasi yang mampu beroperasi dan *survive* dengan baik. Maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya koperasi untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

Adapun tujuan dari pelatihan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi desa sehingga mampu eksis dan bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya di masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kreativitas sumberdaya manusia yang ada di koperasi, sehingga mampu mengembangkan dan memajukan lembaga koperasi menjadi lebih baik lagi.

Pelatihan koperasi adalah kegiatan program pengabdian yang pertama kali dilakukan. Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 13-14 November 2015 bertempat di Kantor Kepala Desa Ragawacana dan dihadiri oleh 23 orang pengurus dan anggota koperasi desa Raga Jaya Lestari. Hari pertama pelatihan diisi oleh pemateri Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si yang menyampaikan dasar-dasar manajemen koperasi yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang koperasi. Masalah utama yang sering terjadi dalam koperasi adalah keterbatasan SDM yang kurang kompeten, sehingga pengelolaan koperasi desa seakan hanya sebatas sampingan dan tidak profesional. Padahal bila koperasi dikelola secara baik dan profesional, maka akan mampu mengangkat tingkat perekonomian dari pengurus maupun anggota koperasi itu sendiri (*lihat gambar*).

Sedangkan pada hari kedua menghadirkan pemateri kedua, yaitu Ibu Yusi Susilawati dalam penjelasannya menyebutkan bahwa bila ingin mendirikan koperasi yang maju dan eksis harus diletakkan aturan mainnya dulu, dimana aturan main



tersebut harus dipatuhi oleh semua pengurus dan anggota koperasi. Misalnya, setiap pengurus dan anggota wajib menyetorkan simpanan wajib dan pokoknya setiap tanggal 10 setiap bulan, maka hal itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh semua pihak. Sebab dengan komitmen dan profesionalisme lah koperasi yang maju dapat diwujudkan.

Gambar 4.9 : Pemateri Pelatihan Koperasi



## 2. Seminar Motivasi Kewirausahaan

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganggap bahwa pekerjaan yang paling menjanjikan adalah menjadi pegawai kantoran atau lebih tepatnya menjadi pegawai negeri. Sedikit sekali yang memiliki pandangan ingin melakukan atau membangun usaha dan menjadi seorang wirausahawan (*interpreneur*). Padahal kemajuan suatu daerah dapat diukur dari seberapa banyak jumlah wirausahawan (*interpreneur*) yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak wirasusaha yang terdapat daerah maka dapat dipastikan semakin maju daerah tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sampai saat ini masih tergolong ke dalam negara berkembang (*emerging country*), sebab dari hasil penelitian ditemukan bahwa

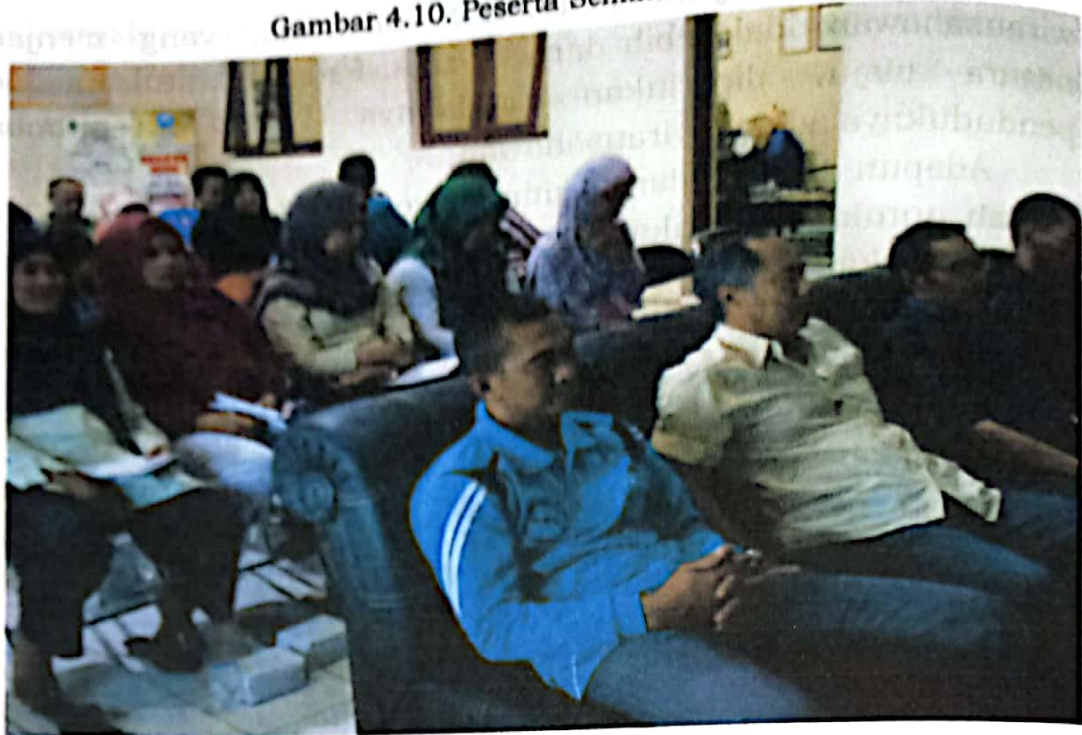


dari total 250 juta penduduk Indonesia, yang menjadi wirausahawan tidak lebih dari 3% saja. Padahal untuk menjadi negara maju, diperlukan setidaknya 20% dari jumlah penduduknya adalah wirausahawan.

Adapun tujuan dari seminar motivasi kewirausahaan ini adalah untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada audiens akan pentingnya berwirausaha dan memberikan motivasi dan kepercayaan diri untuk menjadi wirausahawan. Setelah mengikuti kegiatan seminar motivasi kewirausahaan ini para peserta diharapkan akan lebih termotivasi dan lebih percaya diri untuk berwirausaha. Selain itu para peserta juga akan mampu mencari peluang-peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan mereka sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian di daerahnya masing-masing.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 17-18 Nopember 2015 ini berlangsung dengan baik, hal ini terlihat dari antusiasme para peserta dalam mengikuti paparan dan penjelasan dari para pemateri. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Wasman menjelaskan tentang pandangan-pandangan Islam terkait dengan wirausaha. Dalam penjelasannya pemateri menyampaikan bahwa menjadi wiruusahawan adalah pilihan terbaik bagi umat Islam, sebab Nabi Muhammad sendiri adalah seorang wirausahawan yang sukses. Sementara pemateri kedua yaitu Bapak Ben Hardi, SE menjelaskan lebih detail bagaimana kiat-kiat awal merintis usaha. Pemateri menceritakan awal mula merintis usaha Jerus Nipis Peras merek Jenissa yang beliau miliki berawal dari modal hanya Rp. 3.000.000 dan dengan perakatan rumah tangga seadanya. Namun dengan kemauan dan tekad yang pantang menyerah akhirnya kini usahanya sudah sangat sukses. Pada akhir acara dilakukan sesi tanya jawab yang cukup intens antara pemateri dengan peserta yang begitu antusias menanyakan hal-hal terkait penjelasan dari pemateri (*lihat gambar*).

Gambar 4.10. Peserta Seminar Kewirausahaan



### 3. Pelatihan Manajemen dan Akuntansi Koperasi

Pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga seperti koperasi maupun lembaga keuangan mikro sangatlah penting, sebab dengan adanya pengelolaan dan pelaporan yang baik akan bisa menjaga sisi kredibilitas dan akuntabilitas lembaga tersebut. Oleh sebab itulah mutlak bagi pengurus maupun anggota koperasi memiliki keterampilan akuntansi, sehingga dapat menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus mampu menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi dalam memahami dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan tentang akuntansi keuangan koperasi, terutama untuk koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam, maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam. Dengan kegiatan ini diharapkan pengurus dan pengelola keuangan koperasi dapat terbantuan dalam menyusun serta menginformasikan laporan keuangan

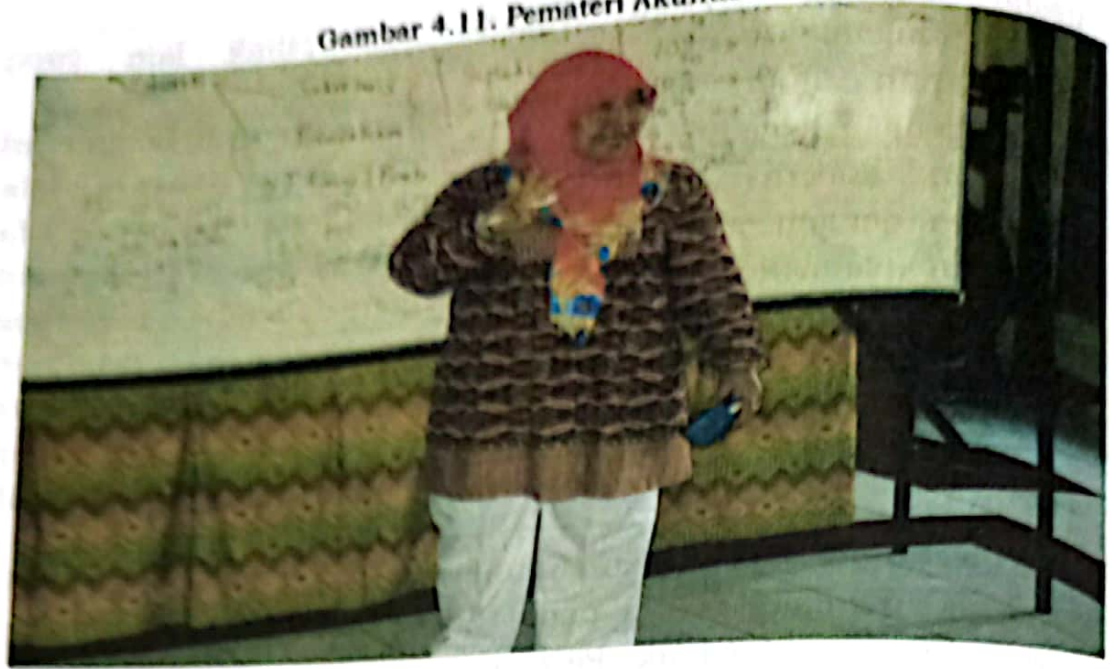


usaha koperasi kepada anggota dan pihak lain yang berkepentingan.

Adapun tujuan dari seminar motivasi kewirausahaan ini adalah dengan kegiatan ini diharapkan pengurus dan pengelola keuangan koperasi dapat terbantuan dalam mengelola keuangan dengan menyusun serta menginformasikan laporan keuangan usaha koperasi kepada anggota dan pihak lain yang berkepentingan. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi ini para peserta diharapkan mampu menyiapkan dan menyusun laporan keuangan koperasi dan lembaga keuangan mikro dengan baik dan benar.

Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk koperasi ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 Nopember 2015 berlangsung dengan baik. Para pemateri menyampaikan ulasan yang sangat fokus pada pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan untuk koperasi desa. Pemateri pertama Bapak Wartoyo, MSI menyampaikan dasar-dasar dari akuntansi, dimana sangat penting setiap instansi untuk menyusun dan menyampaikan pelaporan keuangan secara rutin dan berkala. Hal ini terkait dengan beberapa aspek diantaranya adalah aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada para pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Selain itu urgensi dari adanya pelaporan keuangan juga adalah untuk dapat mengakses pendanaan yang biasanya disalurkan oleh perbankan maupun pemerintah melalui program bantuan pemberdayaan koperasi. Dengan adanya laporan keuangan yang baik maka para donatur tidak akan segan untuk meyalurkan bantuan. Pemateri kedua yaitu Ibu Hj. Dra. Titin Sumartini, M.Pd menyampaikan materi yang lebih ke praktik pengelolaan, pencatatan dan perhitungan akuntansi dalam koperasi, para peserta pun langsung diminta mempraktikkan agar dapat memahami dan menguasai teknis akuntansi dengan cepat dan tepat (*lihat gambar*)

Gambar 4.11. Pemateri Akuntansi Koperasi



#### 4. Pelatihan Marketing

Marketing atau pemasaran merupakan ujung tombak dari suatu perusahaan untuk memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Pemasaran sebuah harus memiliki suatu metode tertentu, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa terjual dengan maksimal. Terdapat beberapa metode marketing yang selama ini sudah lazim dilakukan seperti *personal selling*, *door to door selling* dan *online selling* dan masih banyak lagi. Masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk itulah perlu diberikan pelatihan marketing bagi pengurus dan kelompok wanita di desa Ragawacana untuk memasarkan produk-produk hasil olahannya. Sebab selama ini dari beberapa kelompok wanita yang ada, mereka rata-rata bisa menghasilkan produk yang unik dan variatif, namun sampai sekarang pemasarannya masih belum mampu menjangkau luar daerah. Padahal bila dilihat produk yang dihasilkan cukup berkualitas dan menarik seperti produk tas dan dompet dari bekas bungkus permen, kripik singkong aneka rasa, aneka olahan ubi jalar dan masih banyak lagi hasil atau produk yang bisa dihasilkan oleh kelompok-kelompok wanita di desa Ragawacana. Untuk itulah penting kiranya untuk dilakukan



suatu pelatihan marketing yang diharapkan dapat memberikan masukan atau ide dalam memasarkan produk-produk hasil kreativitas dari kelompok-kelompok wanita (KOPWAN) tersebut.

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan bagi para anggota dan pengurus kelompok wanita untuk memasarkan produk-produk secara lebih baik dan menarik. Pelatihan ini bermanfaat untuk memberikan alternatif dan metode lain dalam melakukan pemasaran yang berbeda dari metode marketing yang selama ini sudah dilakukan. Sehingga diharapkan akan semakin memajukan dan mensejahterakan kelompok wanita yang ada di desa Ragawacana.

Pada pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Nopember 2015 ini dihadirkan dua orang narasumber yang berkompten dalam materi marketing ini. Narasumber pertama menyampaikan dasar-dasar marketig, dimana marketing adalah ujung tombak dari suatu perusahaan, sebab bila sampai marketing suatu perusahaan tidak berjalan efektif, maka perusahaan tersebut pasti akan mengalami kesulitan dalam semua aspek seperti aspek keuangan, produksi dan distribusi. Sedangkan narasumber kedua menjelaskan materi yang lebih teknis dan metode pemasaran yang efektif. Diantara hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran adalah bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu *place, product, price and promotion*. Untuk menciptakan suatu pemasaran yang baik harus diperhatikan *place*, atau tempat-tempat yang tempat untuk melakukan pemasaran, misalkan sekarang dengan menggunakan medsos untuk mempermudah dan memperingan biaya. Kedua adalah *product*, dimana produk yang akan dipasarkan harus dipacking secara manarik, ketiga adalah *price*, atau harga, usahakan berikan harga yang kompetitif untuk produk yang akan dipasarkan sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Dan terakhir adalah *promotion* atau promosi, dimana diperlukan promosi untuk memperkenalkan produk yang akan dipasarkan minimal dengan membuat brosur atau selebaran terkait produk tersebut (lihat gambar)



Gambar 4.12. Suasana Pelatihan Marketing



### 5. Pelatihan Manajemen dan Keuangan Desa

Manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratus, sistematis dan terus menerus, mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Pekerjaan kantor atau tata usaha, sering disebut dengan istilah *office work* atau *clerical work*. Manajemen perkantoran meliputi pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas ketatausahaan dari sebuah kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehemat-hematnya (seefisien mungkin) yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor itu disebut manajemen perkantoran (*Office Management*). Manajemen perkantoran dapat dikatakan sebagai kekuatan yang tidak terlihat (tidak terwujud) yang merencanakan, mengorganisasi dan mengkoordinasikan manusia, uang, metode, material, mesin-mesin, dan pasar (GM) dalam pekerjaan kantor serta mengarahkan dan megawasinya sesuai dengan tujuan pembinaan, serta tujuan organisasi tercapai.



Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah agar tercipta tata kelola perkantoran yang baik dan profesional sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya untuk masyarakat desa Ragawaacana Kecamatan Karamatmulya. Manfaat dari kegiatan ini adalah para staf dan perangkat desa Ragawacana mampu menyusun arsip perkantoran dengan rapi, simpel dan mudah dicari ketika dibutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Balai desa Ragawacana Kecamatan Karamatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2015 pukul 08.00 – 16.00 WIB (lihat gambar)

Peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan ini berjumlah 22 orang yang terdiri dari para pejabat BPD, LKM, dan perangkat desa Ragawacana. Pelatihan ini menyasar para pejabat dan perangkat desa Ragawacana terkait dengan pentingnya pengelolaan kearsipan dan keuangan desa yang selama ini masih terkesan belum tertata rapi sehingga terkadang membuat kesulitan tersendiri dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemateri pertama memaparkan tentang pentingnya pengelolaan kearsipan yang baik, sebab dengan pengelolaan yang baik akan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga mutu pelayanan dapat ditingkatkan. Sedangkan pemateri kedua mempresentasikan bagaimana teknis pengarsipan yang baik, misal dengan penggunaan metode alphabetis sehingga semua berkas yang ada dapat dikategorikan menurut huruf yang telah ditempatkan dalam direktorinnya masing-masing. Dengan demikian ketika hendak mencari dokumen yang dibutuhkan akan dengan cepat menemukan tanpa harus mengaduk-aduk semua dokumen yang ada. Selain itu bisa juga dengan teknik atau metode list cabinet, dimana dokumen akan dilistkan dalam boks-boks yang sejenis dan berurutan sesuai dengan periode waktu. Dengan demikian dapat diurutkan dengan mudah dan juga dapat dilihat mana dokumen yang masih terpakai dan mana dokumen yang sekiranya sudah tidak lagi dipakai.



Gambar 4.13. Pemateri Pelatihan Manajemen Keuangan Desa



## 6. Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Sampah saat ini sudah menjadi masalah suatu kota, dampak buruk yang ditimbulkannya sangat kompleks di antaranya dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, menurunnya nilai estetika suatu daerah/kota, mengurangi usia operasi TPA, tingginya biaya operasi dan pemeliharaan pengelolaan sampah (mulai dari sumber, pengumpulan, transfer & transport sampai ke TPA), menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat yang sudah sadar akan penting kebersihan dan lingkungan sehat dengan adanya sampah yang berserakan.

Selain dampak buruk, melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) sampah juga mempunyai keuntungan yang bisa dimanfaatkan : **Reduce** adalah upaya mengurangi volume sampah, contoh : dengan memanfaatkan tas belanjaan untuk kepasar sehingga mengurangi pemakaian kantong plastik/kresek; **Reuse** adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa melakukan perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat, contoh : kaleng cat dijadikan pot tanaman dan untuk kaleng cat besar dapat digunakan sebagai tempat



sampah; **Recycle** adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat, contoh : sampah plastik dapat diolah menjadi tas, sandal atau payung dan sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos (*lihat gambar*)

Dengan mengacu kepada keberadaan kondisi sebagaimana tersebut diatas perlu penanganan yang cermat terhadap masalah sampah ini sehingga masalah timbunan sampah dapat teratasi dan dengan penanganan sampah yang baik dapat menambah *income* bagi masyarakat. Salah satu di antaranya adalah pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat (TPST 3R) di desa Ragawacana yang mana hal ini sebagai langkah awal dalam menyongsong kebijakan baru pengelolaan sampah kota di mana sampah harus dikurangi mulai dari sumbernya dan sampah harus diolah untuk dimanfaatkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada para pengurus dan anggota kelompok TPST3R Desa Ragawacana dalam memanfaatkan limbah sampah menjadi produk olahan daur ulang yang bernilai tinggi, berdaya saing dan dapat menghasilkan *income* tambahan untuk para anggotanya. Pelatihan ini bermanfaat untuk menciptakan produk-produk dari bahan limbah yang sudah tidak terpakai menjadi beragam produk dengan menggunakan bahan-bahan limbah bekas yang terdapat di sekitar desa Ragawacana kecamatan Karamatmulya.

Dalam pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 01-02 Desember 2015 dihadiri dua orang narasumber. Dalam pemaparannya para narasumber lebih menyoroti pada pemanfaatan limbah rumah tangga yang selalu melimpah setiap harinya. Selama ini limbah sampah kebanyakan hanya diolah menjadi pupuk kompos dan sejenisnya, namun pada . Masalah sampah saat ini termasuk sepele. Tetapi, jika kita sadari bahwa setiap orang mengeluarkan sampah dan akhirnya sampah tersebut akan menggunung. Untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan



banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik lalu menjadikan sebagai pupuk, tas, dll. Sampah bisa diolah dengan berbagai cara salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R. Metode ini bisa dilakukan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik yaitu dengan cara membuat tempat sampah khusus untuk sampah organik dan anorganik. Dengan memilah sampah organik dan anorganik kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Gambar 4.14, Suasana Pelatihan Teknologi Tepat Guna



## J. Pendampingan

Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Konstitusi mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat. Konteks dalam mensejahterakan rakyat bukan hanya dalam satu bidang tetapi dari berbagai bidang seperti bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Disamping itu juga terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya perekonomian khususnya pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).



Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan memberikan kontribusi besar bagi negara khususnya di bidang perekonomian, karena KUMKM salah satu pendorong meningkatnya perekonomian masyarakat berkembang kearah yang lebih baik.

Suatu perekonomian dikatakan baik atau meningkat yaitu ketika taraf hidup masyarakat atau kebutuhan masyarakat terpenuhi, dengan kata lain sejahtera, hal ini pasti tidak terlepas dari namanya KUMKM yang telah memberikan kontribusi besar. Tetapi kenyataannya sekarang ini KUMKM memiliki tantangan yang sangat besar yaitu pada tahun 2015 akan terjadi MEA, dimana KUMKM akan bersaing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlangsungan KUMKM itu sendiri dengan cara membuat gebrakan baru baik dari sistem, strategi dan lain-lain.

Ketika KUMKM memiliki tantangan dan permasalahan tersebut, disinilah tugas dan peranan masyarakat baik dari tingkat birokrasi atau pemerintah, praktisi dan akademisi untuk saling bahu membahu membantu KUMKM agar tetap bertahan dan berkembang lebih baik lagi demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

Desa Ragawacana di Kecamatan Keramat Mulya Kabupaten Kuningan merupakan salah satu desa di Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki KUMKM cukup banyak dan memiliki peranan penting dalam perekonomian khususnya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Saat ini KUMKM di Kabupaten Kuningan mengalami perkembangan yang sangat baik dari tahun ke tahunnya, dan hal ini merupakan suatu potensi bagi Kabupaten Kuningan, terlepas dari itu juga permasalahan yang dihadapi masih perlu diperhatikan oleh masyarakat dikalangan Pemerintah, Praktisi dan Akademisi yang perlu serta membantu KUMKM di Kabupaten Kuningan berkembang lebih baik.

Perubahan sosial ekonomi masyarakat disini yaitu perubahan kearah yang lebih baik dan berkembang dengan tujuan akhir mencapai masyarakat yang sejahtera. Disamping itu juga Pemerintah, Praktisi, dan Akademisi memiliki cara untuk meningkatkan KUMKM di Kabupaten Kuningan salah satunya yaitu



dengan Pendampingan, dengan adanya pendampingan di lapangan ini diharapkan adanya penguatan yang dilakukan pendamping menjadi stimulus atau mediasi bagi KUMKM lebih berakselerasi berkembang ke arah yang lebih baik.

Dari latar belakang diatas, terdapat tujuan sebagai berikut :

1. Terbentuknya KUMKM yang mandiri dan berdaya saing.
2. Terbentuknya unit usaha mandiri bagi kelompok wanita usaha KUMKM dan masyarakat umum.
3. Jaringan usaha sudah *eshtablised* dan operasional.
4. Terwujudnya masyarakat atau kelompok usaha yang menjadi pengusaha sebagai hasil dari program.

Ruang lingkup dalam kegiatan Pendampingan KUMKM di Desa Ragawacana adalah Sumber Daya KUMKM, Pengembangan Usaha KUMKM, Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan KUMKM, Sarana dan Prasarana KUMKM, Pengembangan Informasi Teknologi dan Jaringan KUKM.

Sistematika penyajian dan kegiatan pendampingan didasarkan pada data yang sudah ada di KUMKM beserta permasalahannya, pendampingan ini terfokus kepada kelompok usaha wanita, koperasi wanita dan kelompok-kelompok usaha lainnya.

#### **K. Permasalahan yang dihadapi Koperasi, Kelompok Wanita, dan Kelompok Tani (ternak).**

Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah :

1. Kelompok wanita dan koperasi masih mempunyai kekurangan dalam permodalan atau keuangan sehingga masih perlu dibantu dalam pengembangan usaha.
2. Kelompok tani memiliki masalah berupa kekurangan modal untuk membeli kebutuhan budi daya ikan lele seperti terpal dan sebagainya.
3. Kelompok Ternak yaitu budidaya ternak domba, untuk keuangan kelompok ini masih membutuhkan permodalan.
4. Kelompok usaha wanita masih mempunyai permasalahan didalam permodalan, karena kelompok ini masih kekurangan modal untuk proses produksi



5. Kelompok tani cenderung lebih ke pakan, dan sama halnya dengan yang lain masih membutuhkan modal atau kekurangan modal dalam pengembangan usahanya.
6. Permintaan produk saat ini semakin meningkat, hal ini disebabkan karena penggunaan produk bisa digunakan untuk semua komoditi seperti : tanaman padi, tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, tanaman bawang, dan lain-lain
7. Masih terbatasnya jaringan pemasaran
8. Strategi pemasaran belum memaksimalkan teknologi yang sudah ada
9. Terbatasnya kelompok usaha yang sejenis
10. Permintaan terhadap ikan lele sekarang semakin meningkat karena banyaknya masyarakat membuka usaha dibidang kuliner / seafood sehingga permintaan terhadap ikan lele semakin meningkat.
11. Hasil kelompok usaha wanita ini yaitu produk makanan ringan seperti dendeng abon, sistik dan lain-lain, permintaan terhadap produk ini sangat tinggi karena banyak permintaan dari masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi belum terpenuhi dengan penawaran produk.

#### **L. Hambatan Pendampingan**

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam memberikan pendampingan, terdapat beberapa jenis kendala atau permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM, yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga tampak pada ketidakmampuan mereka dalam hal manajemen usaha, terutama dalam hal tata tertib pencatatan / pembukuan.
2. Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus

dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.

3. Kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi jika dikelola secara mandiri.
4. UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pendanaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional - meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan - demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.



**Gambar 4.15. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA**

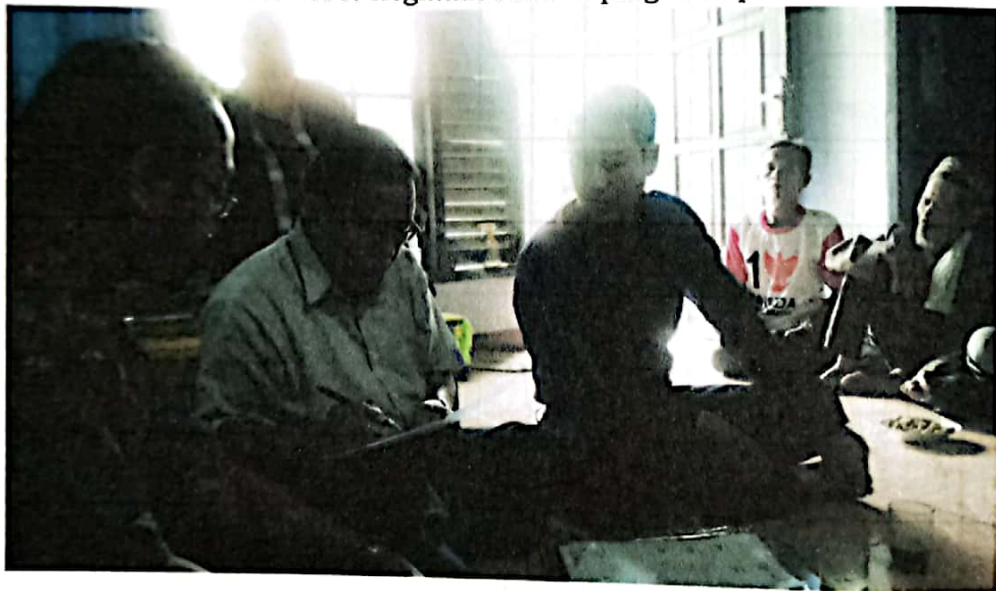
No	Kegiatan	Oktober				November				Desember				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Sosialisasi Program	x	x											
4	Pembinaan Kelompok Wanita/koperasi:													
	1. Aspek SDM dan Kelembagaan					x								
	2. Aspek Sarana Prasarana					x								
	3. Aspek Pemasaran					x								
	4. Aspek Pengembangan Usaha					x								
	5. Aspek IT dan Jaringan KUMKM					x								
5	Pelatihan Kelompok Usaha						x	x	x					
6	Pendampingan program									x				
7	Monitoring dan Evaluasi										x	x	x	

### **M. Hasil Pendampingan**

Dengan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian manfaatnya sangat berarti karena dengan pendampingan ini pemerintah desa dan masyarakat bisa mengetahui sisi kelebihan dan kelemahan KUMKM yang berada di Desa Ragawacana, oleh karenanya kami selaku pendamping menyampaikan inspirasi KUMKM kepada pemerintah desa khususnya agar nantinya apa yang menjadi kendala bagi KUMKM yang tidak mampu dilakukan oleh pendamping dapat terjawab dan terselesaikan

Dalam poin ini asumsi kami sekaligus saran kami sebagai Pendamping yaitu perlu diadakan semacam motoring kinerja dan pembinaan serta pendampingan secara terus menerus kepada KUMKM, agar kita bisa melihat perkembangan KUMKM di lapangan dengan baik.

Gambar 4.16. Kegiatan Pendampingan Koperasi





Gambar 4.17. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi



Gambar 4.18 Pendampingan Pembuatan Produk Makanan



Gambar 4.19 Produk-Produk Usaha Kelompok Wanita



Gambar 4.20 Produk Usaha Daur Ulang Sampah





Gambar 4.21. Salah Satu Jenis Produk Kreativitas Kelompok Wanita



Gambar 4.22. Salah satu Jenis hasil produk Kreativitas Kelompok Wanita



Gambar 4.23. Suasana Pendampingan Koperasi



Gambar 4.24. Kegiatan Pendampingan Peternak Ikan lele





Gambar 4.25. Lokasi Peternakan ikan lele



## BAB VI PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Pemberdayaan kaum perempuan di desa Ragawacana dilakukan dengan memperkuat peran dua institusi yaitu lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi desa dan kelompok-kelompok wanita yang ada di desa Ragawacana.
2. Penguatan peran lembaga Keuangan mikro dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan softskill diantaranya pelatihan koperasi, pelatihan manajemen SDM, dan pelatihan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi.
3. Penguatan peran kelompok wanita dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan atau softskill dalam bentuk seminar keirusahaan, pelatihan Marketing, dan pelatihan teknologi tepat guna.

### 2. Saran

1. Kegiatan pelatihan sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan para peserta dalam mengelola lembaganya, namun tetap diharapkan pendampingan dari tim pengabdian.
2. Program kegiatan yang dilakukan berjalan sudah cukup baik, namun belum terlihat antusiasme dari masyarakat, karena dari kegiatan ke kegiatan peserta yang hadir cenderung satgna, oleh sebab itu diharapkan kedepan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat sasaran dengan tim pengabdian sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan lebih bermanfaat bagi orang yang lebih banyak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, DandJ .A. Robinson. 2012. Why Nation Fail : The Origin of Power, prosperity and Poverty.Crown Publishing newYork
- Anonim. 2006. Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Keuangan Mikro. [www.profi.or.id/ind/downloads/](http://www.profi.or.id/ind/downloads/)
- Aris Ahmad Risadi, 2014, Sengkarut Daerah Tertinggal: Buah Terlarang Desentralisasi.Leutikaprio,Ygyakarta
- Ashari, 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No.2,Juni.
- Charles and Dorine, 2012, Effect of Microfinance Serviceson the Financial Empowerment of Youthin Migori County, Kenya.
- Darwin (Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, Jakarta,2003.
- Darwin(Penyunting), Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,Pusat penelitian Ekonomi-LIPI, Jakarta, 2003.
- Didin Wahyudin, Key Succes Factors In Micro Financing, paper pada Diskusi Panel Microfinance Revolution: "Future Perspective for Indonesian Market", Jakarta, Desember2004.
- Ismawan,B. Dan S.Budiantoro. 2005. Mapping Microfinance in Indonesia. Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005.
- JaegulChoo, Changhyun Leean ddkk, 2012, Understanding and Promoting Micro-Finance Activities in Kiva.Org
- Karakteristik Orang Kecil. Harian Kompas.Rabu,13 Agustus 2003
- Krishnamurti, B. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel-Th.II-No.2=April 2003.
- Krishnamurti,B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
- Kementerian KUMK. 2006. Martowijoyo,S .2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan. Jurnal Ekonomi Rakyat,Th1, No.5, Juli 2002.
- Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Terjemahan, Edisi Ketujuh,

Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000. Mikro. <http://www.profil.or.id/ind/>.

Nadia Asghar, 2012, Microfinancing for Poverty Reduction: An Empirical Study of Rural Areas Tehsil Gujarat-Pakistan  
Robinson, Marquiere, 2000, The Micro Finance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, The World Bank.

Rokhmin Dahuri, 2012, Mengelola Pembangunan Berkelanjutan Di Tengah Perubahan Iklim Global., RODA Bahari, Bogor

Rokhmin Dahuri, 2013, The Blue Future of Indonesia, RODA Bahari, Bogor

Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta.

Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan, Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia, Ekonomi Rakyat, Th. II-No. 1-  
Maret 2003. <http://www.ekonomirakyat.org/edisi13/artikel3.htm>.

Setyo Budiantoro, 2003, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 8, Nopember 2003, Yogyakarta.

Sudaryanto, T. Dan M. Syukur. 2002. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Hlm. 101-121. dalam Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syamdan M. Ariani (Eds). Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis. Monograph Series No. 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Sumodiningrat, G. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait Dengan Kebijakan otonomi Daerah. Artikel Th II No 1. Jurnal Ekonomi Pertanian. [www.ekonomirakyat.go.id](http://www.ekonomirakyat.go.id).

Syukur, M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit

Syukur, M., 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapangan. Warta Prima Tani. Volume 1 Nomor 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.



- Usman, S., W.I. Suharyo, B. Sulaksono, M.S. Mawardi, N. Toyamah, dan Akhmadi. 2004. *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Wijono, W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.
- Wijono, W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf>

CV.  
**ELSI pro**  
PENERBIT

ISBN 978-602-1091-31-9

